

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Pengeluaran 2013 - 2017



**Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Menurut Pengeluaran**

2013 - 2017



<https://www.bps.go.id>



Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Pengeluaran 2013 - 2017

ISSN : 2654-3095
Nomor Publikasi : 14550.1805
Katalog BPS Provinsi Riau : 9302020.14
Ukuran Buku : 21 cm X 28 cm
Jumlah Halaman : xii + 76 halaman

Naskah
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh
© Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://riau.bps.go.id>

Tim Laporan

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau
Menurut Pengeluaran 2013 - 2017

Pengarah

Aden Gultom
Urip Widiyantoro

Editor

Gunadi
Fitri Hariyanti

Penulis

Ferdian Fadly
Rahmi Renzya

Pengolah Data

Ferdian Fadly
Yenni Elvira

Desain Kulit

Ferdian Fadly

Desain dan Tata Letak

Ferdian Fadly

<http://riau.bps.go.id>

Kata Pengantar

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Pengeluaran merupakan publikasi pertama yang menampilkan kondisi ekonomi dari sisi pengeluaran beberapa tahun terakhir, yakni periode 2013-2017. Publikasi ini merupakan hasil rekapitulasi dari pendapatan regional masing-masing kabupaten/kota.

Perkembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota penting untuk dicermati secara spasial agar memudahkan para pengambil kebijakan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan. Pola perkembangan ekonomi tersebut dapat berbeda antarkabupaten/kota, karena sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia serta teknologi yang tersedia. Ketersediaan faktor-faktor produksi akan menghasilkan output/produksi yang beragam dan pada gilirannya akan membentuk struktur ekonomi daerah. Struktur dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan gambaran atas kemajuan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah disajikan dalam publikasi ini.

Semoga publikasi yang berjudul "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Pengeluaran 2013-2017" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna data sebagai bahan rujukan. Saran dan masukan dari pengguna data sangat diharapkan demi meningkatnya kualitas publikasi ini di masa mendatang. Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini.

Pekanbaru, Oktober 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau,



Aden Gultom

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	ix
BAB I. Pendahuluan.....	3
1.1 Pengertian PDRB	3
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	5
BAB II. Metode Estimasi dan Sumber Data	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT.....	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	17
2.5 Perubahan Inventori.....	22
2.6 Ekspor dan Impor.....	26
BAB III. Perkembangan PDRB Antardaerah	31
3.1 Gambaran Umum Perekonomian Riau 2013 – 2017.....	31
3.2 Gambaran Perekonomian Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	33
3.3 Struktur PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Pengeluaran Tahun 2017	35
LAMPIRAN	41

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau, 2013-2017 (%)	31
2	Perbandingan Distribusi PDRB Provinsi Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 dan 2017.....	32
3	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017.....	33
4	Kontribusi PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013 dan 2017.....	34
5	Distribusi PDRB Provinsi Riau Menurut Pengeluaran Tahun 2017	35
6	Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Pengeluaran Tahun 2017.....	35
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis 2013-2017.....	36
8	Distribusi PDRB Kota Pekanbaru Menurut Pengeluaran Tahun 2017.....	37

Daftar Tabel Lampiran

Tabel		Halaman
1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2017 (Juta Rupiah)	41
2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2017 (Juta Rupiah)	46
3	Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2017 (Indeks 2010=100)	51
4	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2017 (Persen)	56
5	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit menurut Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2017 (Persen)	61
6	Kontribusi PDRB Menurut Komponen Pengeluaran Per Kabupaten/Kota 2013-2017	66
7	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Tiap Komponen Pengeluaran 2013-2017.....	71

Ringkasan Eksekutif

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Selama ini, PDRB Kabupaten/Kota hanya disajikan dari sisi pendekatan produksi sehingga publikasi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Pengeluaran ini merupakan publikasi pertama yang menampilkan kondisi ekonomi dari sisi pengeluaran menurut kabupaten/kota beberapa tahun terakhir, yakni periode 2013-2017. Publikasi ini merupakan hasil rekapitulasi dari pendapatan regional masing-masing kabupaten/kota dari sisi pengeluaran.

Secara umum, perekonomian Indonesia tumbuh melambat di tengah perekonomian global yang belum stabil, tidak terkecuali Provinsi Riau. Pada sisi produksi, melambatnya ekonomi Riau dalam rentang tahun 2013-2017 diindikasikan terutama oleh turunnya produksi minyak dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi pengeluaran, kondisi tersebut tercerminkan oleh kontribusi ekspor yang terus berkurang selama beberapa tahun terakhir. Hal ini berimbas kepada kabupaten-kabupaten yang kontribusi ekspor minyaknya cukup besar, seperti: Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

Secara umum, kabupaten/kota memiliki struktur ekonomi dari sisi pengeluaran yang tidak jauh berbeda dengan Provinsi Riau. Ada 3 komponen utama yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor mendominasi perekonomian kabupaten/kota meskipun dengan besaran komposisi dan urutan peringkat yang cukup bervariasi. Namun demikian hal tersebut tidak berlaku untuk Kota Pekanbaru yang memiliki karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Struktur PDRB menurut pengeluarannya didominasi oleh permintaan untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Akibatnya, berbeda dengan kabupaten/kota lain yang menikmati surplus atau net ekspor positif, Kota Pekanbaru justru mengalami defisit atau net ekspor negatif. Net ekspor negatif ini menunjukkan bahwa di Kota Pekanbaru lebih banyak barang yang diimpor masuk daripada yang diekspor ke luar.

Pendahuluan

1.1 Pengertian PDRB

1.2 Kegunaan PDRB

BAB

1

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah

tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya didasarkan atas Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 yang dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan

Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi subkategori-subkategori lapangan usaha.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, 2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, 3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, 4) pembentukan modal tetap domestik bruto, 5) perubahan inventori, dan 6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor), di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu wilayah. Lapangan-lapangan usaha yang mempunyai
- peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah (termasuk luar negeri).
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar wilayah (termasuk luar negeri).
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Metode Estimasi dan Sumber Data

2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2.2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT

2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

2.5 Perubahan Inventori

2.6 Ekspor dan Impor

BAB

2

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh

residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classification of Individual Consumption According to Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 golongan pokok COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 golongan pokok COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung

adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan konsumsi antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai

komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,

- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT Hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin kesatu dikelompokkan menjadi tujuh golongan pokok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin kedua dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);

6. PKRT ADH Konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat dengan hasil poin kelima.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas tujuh jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial,

organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimile, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya.
- Penyusutan.
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber Data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SK-LNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata

pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT,

j : Jenis pengeluaran LNPRT,

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADH Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

i. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditas (pendapatan jasa).

ii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan

bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

iii. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi ADH Berlaku

Secara umum, PK-P ADH Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P ADH Berlaku =

Output nonpasar
– penjualan barang dan jasa
+ output Bank Indonesia

Output nonpasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADH Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran Pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi ADH Konstan

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ADH Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. *Deflator* yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk

perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan

hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan lahan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor dua digit HS (*Harmonized System*), yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi).

- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data eksplorasi mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi

(produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH Konstan, maka PMTB ADH Berlaku tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal

lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADH Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan dua cara.

Pertama, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit).

Kedua, untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan men-

deflate nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan SKK Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan

data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong.

Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak & Keswan Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori ADH Konstan, dengan cara *men-deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADH Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori ADH Berlaku dengan *meng-inflate* perubahan inventori ADH Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH Konstan dihitung dengan:

- a) *Men-deflate* nilai perubahan inventori ADH Berlaku dengan indeks harga yang sesuai,
- b) mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-markup*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan

ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net ekspor antardaerah
 - Ekspor antardaerah
 - Impor antardaerah

iv. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI

- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang.

Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sedangkan net ekspor antarwilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB Pengeluaran.

Tinjauan Perekonomian Riau

3.1 Gambaran Umum Perekonomian Riau 2013-2017

3.2 Gambaran Perekonomian Kabupaten/Kota

3.3 Struktur Perekonomian Menurut Pengeluaran

BAB

3

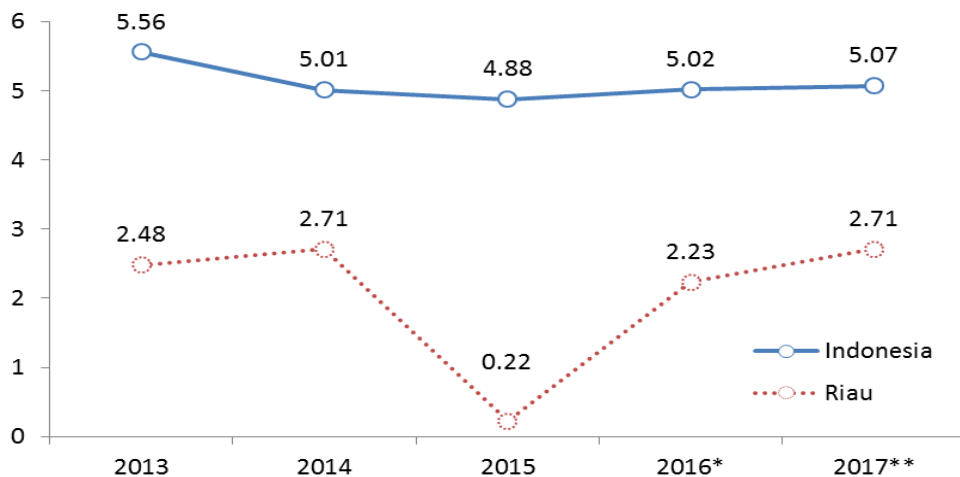
3.1. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN RIAU 2013 - 2017

Secara umum, perekonomian Indonesia saat ini sedang memasuki tahap *recovery* setelah mengalami perlambatan pada tahun 2015 akibat krisis ekonomi dan ketidakpastian di level internasional. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2017 secara berturut-turut yaitu 5,56 persen, 5,01 persen, 4,88 persen, 5,02 persen, dan 5,07 persen. Sementara itu, Provinsi Riau dalam periode yang sama secara berturut-turut hanya mampu tumbuh 2,48 persen, 2,71 persen, 0,22 persen, dan 2,23 persen, dan 2,71 persen. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa hingga tahun 2015, ekonomi Riau sedikit mengalami perlambatan. Namun demikian pada tahun 2016 dan 2017,

Ekonomi Riau sudah tumbuh lebih baik. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian Indonesia.

Pada sisi produksi, rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau dalam rentang tahun 2013-2017 diindikasikan terutama oleh turunnya produksi minyak dalam beberapa tahun terakhir. Seiring bertambahnya usia, produktivitas dari sumur-sumur minyak di Riau mengalami penurunan. Selain itu, gejolak harga dunia komoditas utama Riau seperti minyak mentah dan kelapa sawit yang tidak stabil turut berkontribusi terhadap perlambatan tersebut. Khusus untuk tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Riau sangat rendah sebagai dampak terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017



* Angka Sementara

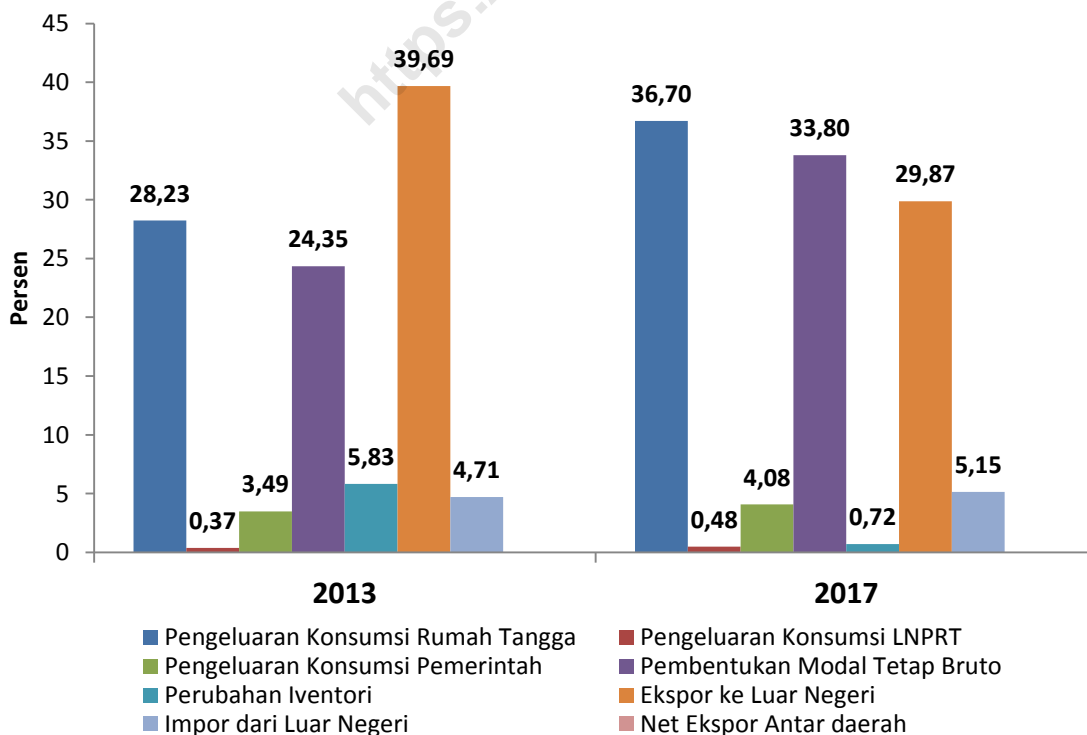
** Angka Sangat Sementara

Pada sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Riau tercermin dari kinerja ekspor selama beberapa tahun terakhir. Berkurangnya produksi minyak pada sisi produksi berimbas pada turunnya ekspor ke luar negeri pada sisi permintaan akhir. Kontribusi Ekspor ke Luar Negeri pada perekonomian Riau berkurang dari 39,69 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 29,87 persen pada tahun 2017. Ekspor ke Luar Negeri Riau yang dulunya mendominasi perekonomian Riau dari sisi permintaan akhir, kini hanya mampu menduduki peringkat tiga setelah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

dan Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2017.

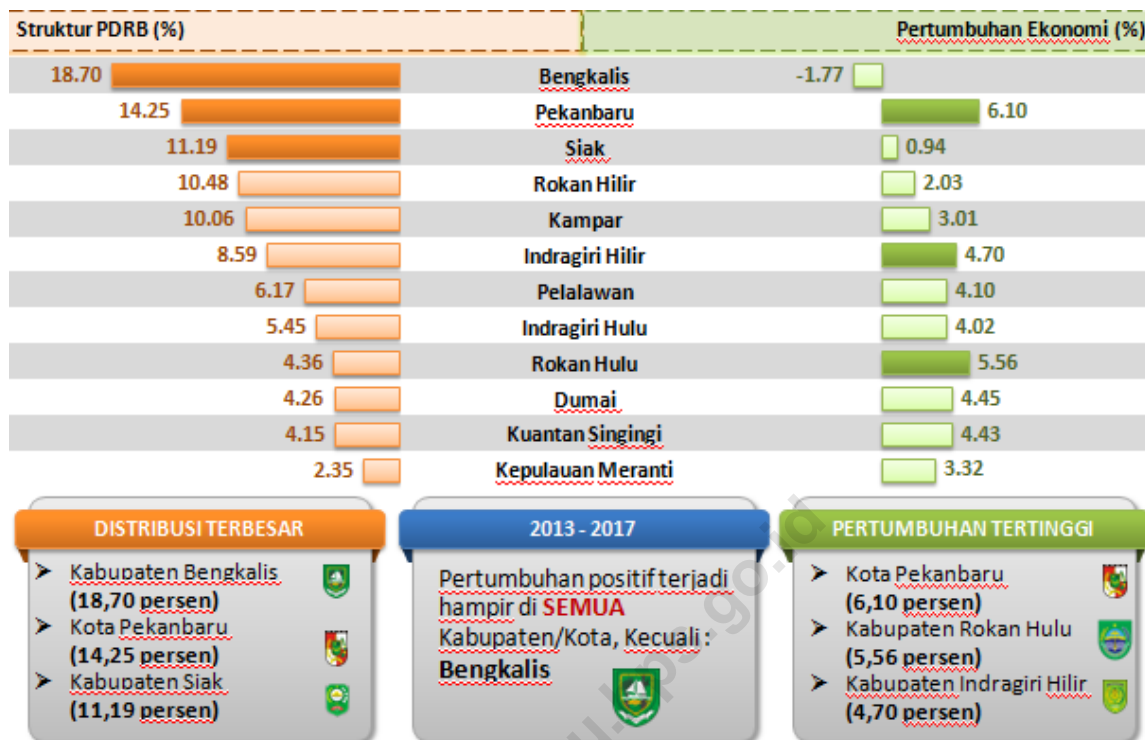
Sementara itu, kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami peningkatan dari 28,23 persen pada tahun 2013 menjadi 36,70 persen pada tahun 2017. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto juga mengalami peningkatan dari 24,35 persen pada tahun 2013 menjadi 33,80 persen pada tahun 2017. Kedua komponen ini menggantikan peran Ekspor ke Luar Negeri sebagai penopang utama dalam perekonomian Riau dari sisi pengeluaran.

Gambar 2 Perbandingan Distribusi PDRB Provinsi Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 dan 2017



3.2 GAMBARAN PEREKONOMIAN RIAU MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

Gambar 3 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2017



Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai membaik pada tahun 2017, ekonomi Riau juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2017 sebesar 2,71 persen lebih lebih baik dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,23 persen. Hal ini didukung dengan membaiknya harga beberapa komoditas unggulan Riau, seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan berkurangnya bencana asap secara drastis di Riau, menyebabkan ekonomi Riau tumbuh sebesar 2,23 persen. Kondisi ini juga mempengaruhi

perkembangan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau yang cenderung membaik di tahun 2017, walaupun masih ada kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Siak merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Riau tahun 2017. Secara berturut-turut ketiga kabupaten/kota tersebut menyumbang sebesar 18,70 persen, 14,25 persen, dan 11,19 persen. Dari ketiga kabupaten/kota tersebut hanya Kota Pekanbaru yang tumbuh

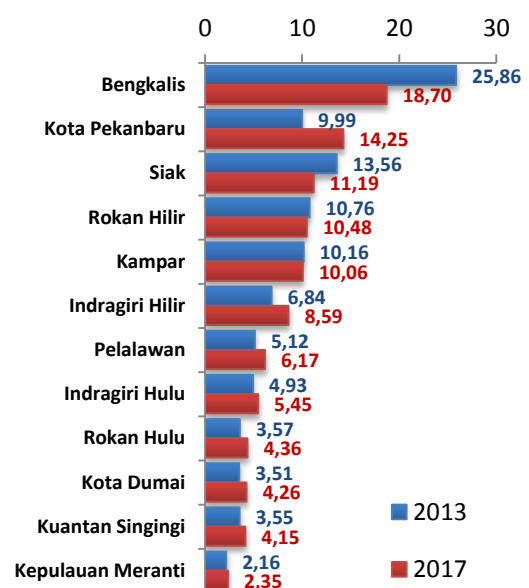
lebih baik dibandingkan Provinsi Riau sebesar 2,71 persen. Kota Pekanbaru tumbuh 6,10 persen dan menjadi kabupaten/kota dengan pertumbuhan tertinggi di Riau pada tahun 2017. Hal tersebut cukup beralasan mengingat pertumbuhan yang tengah gencar dilakukan Kota Pekanbaru terutama di bidang infrastruktur. Besarnya kontribusi Kota Pekanbaru didukung oleh kekuatan aktivitas perekonomian di luar minyak, yakni lapangan usaha konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan.

Sementara itu, Kabupaten Siak hanya tumbuh sebesar 0,94 persen. Di saat yang sama, Kabupaten Bengkalis bahkan turun 1,77 persen. Hal ini dikarenakan kontribusi minyak dalam perekonomian kedua kabupaten ini sangat signifikan. Sehingga, ketika produksi minyak saat ini mengalami penurunan sebagaimana yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya, kedua kabupaten ini menjadi cukup tertekan.

Kondisi ini menyebabkan terjadi perubahan komposisi perekonomian antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis yang tadinya cukup dominan dalam perekonomian Riau,

perannya saat ini semakin berkurang. Kontribusi Kabupaten Bengkalis dalam perekonomian Riau berkurang dari 25,86 persen pada tahun 2013 menjadi 18,70 persen pada tahun 2017. Hal ini juga dialami oleh Kabupaten Siak. Kontribusinya dalam perekonomian Riau berkurang dari 14,25 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 11,19 persen pada tahun 2017. Situasi ini menyebabkan Kabupaten Siak harus turun satu peringkat menjadi penyumbang ketiga terbesar dalam perekonomian Riau disalip oleh Kota Pekanbaru yang tumbuh lebih baik dalam rentang periode yang sama.

Gambar 4 Kontribusi PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013 dan 2017

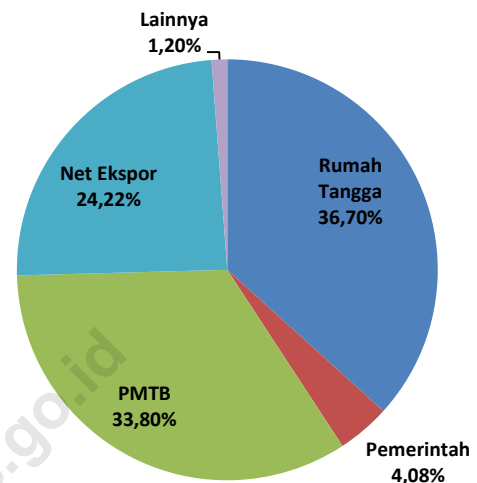


3.3 STRUKTUR PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2017

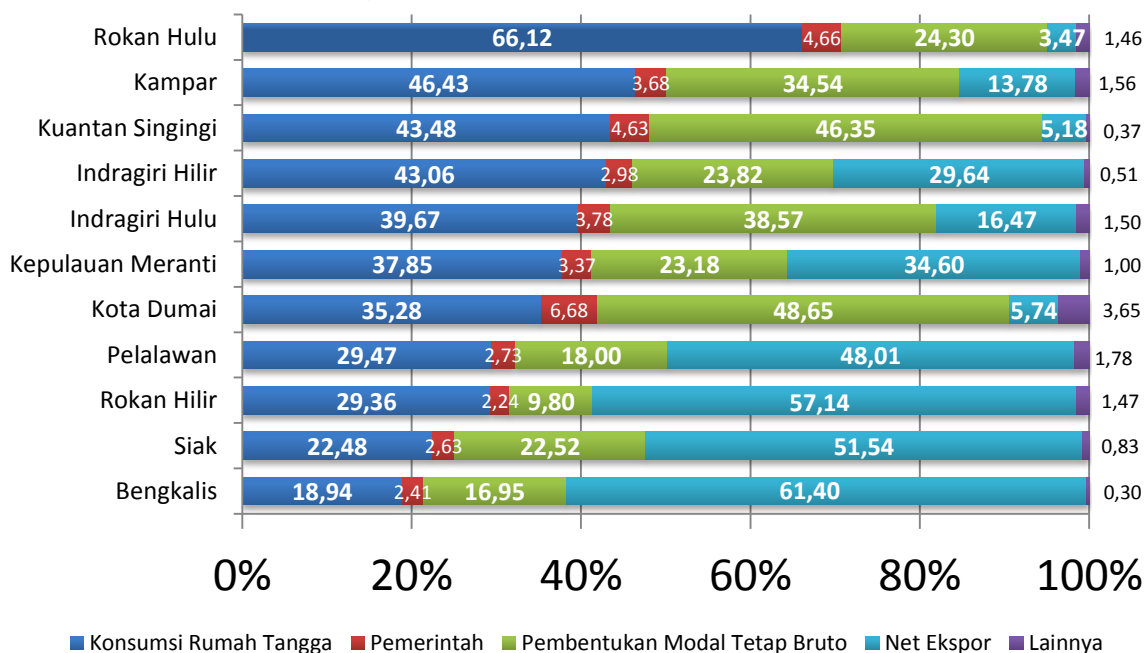
Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Provinsi Riau didominasi oleh 3 komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Net Ekspor. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkontribusi sebesar 36,70 persen. Sementara itu, PMTB berkontribusi sebesar 33,80 persen. Net Ekspor atau Ekspor diikurangi dengan Impor berkontribusi sebesar 24,22 persen terhadap perekonomian Riau.

Secara umum, kabupaten/kota memiliki struktur yang tidak jauh berbeda dengan Provinsi Riau. Pada 3 komponen utama tersebut juga komponen yang mendominasi perekonomian kabupaten/kota meskipun dengan besaran komposisi dan urutan peringkat yang cukup bervariasi.

Gambar 5
Distribusi PDRB Provinsi Riau Menurut Pengeluaran Tahun 2017



Gambar 6 Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Pengeluaran Tahun 2017



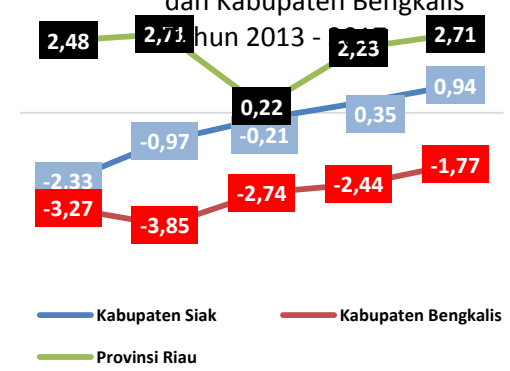
Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Pelalawan adalah kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik hampir sama, yaitu Net Ekspor adalah penyumbang terbesar dalam perekonomiannya yaitu berkisar antara 48 persen hingga 61 persen. Sumbangan Net Ekspor terbesar terjadi di Kabupaten Bengkalis, yaitu mencapai 61,40 persen. Kontribusi komponen pengeluaran yang cukup signifikan di 4 kabupaten ini selain Net Ekspor adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Sebagian ekspor di kabupaten-kabupaten ini adalah minyak mentah hasil produksi di lapangan usaha pertambangan. Turunnya produksi minyak mentah, yang berimbas pada penurunan volume ekspor, beberapa tahun terakhir ini cukup menggoyang perekonomian di kabupaten-kabupaten tersebut. Hal ini terjadi terutama di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis. Kedua kabupaten ini selalu tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan Provinsi Riau dalam rentang beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, karakteristik perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi penyumbang

terbesar dalam perekonomiannya adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto. Sedangkan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yang disusul oleh Net Ekspor, bukan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik yang terjadi di kedua kabupaten ini masih relatif rendah dibandingkan dengan Net Ekspornya. Keadaan yang berbeda terjadi di Kota Dumai dan kabupaten Kuantan Singingi. Penyumbang terbesar dalam perekonomian di kedua daerah ini justru komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu lebih dari 45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi fisik yang relatif cukup besar terjadi di wilayah ini.

Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis tahun 2013 - 2017

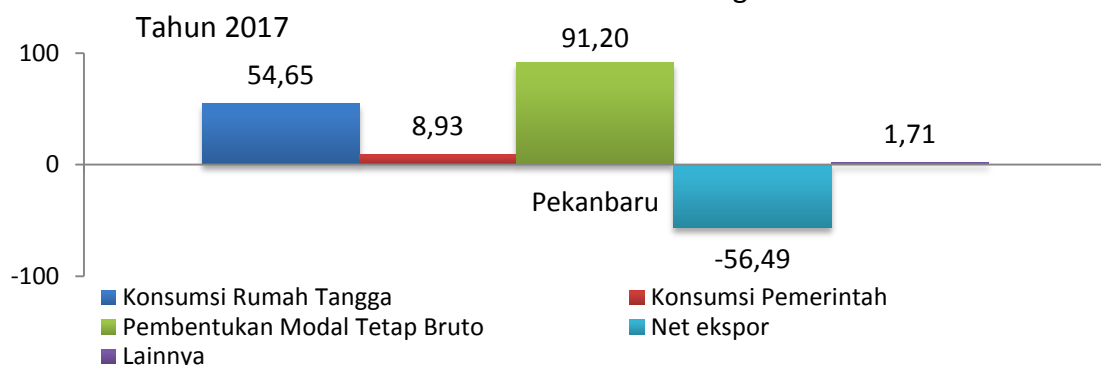


Karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau ditunjukkan dalam perekonomian Kota Pekanbaru. Struktur PDRB Pengeluarannya didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Kontribusi PMTB di Kota Pekanbaru mencapai 91,20 persen dari total PDRB-nya. Hal ini menunjukkan besarnya investasi fisik yang terjadi di Kota Pekanbaru baik dalam bentuk bangunan maupun nonbangunan (mesin, kendaraan, dan lainnya). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kota Pekanbaru juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan yaitu sebesar 54,65 persen terhadap total perekonomian. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang relatif banyak. Selain itu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga banyak terpusat di Kota Pekanbaru. Selain Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dari Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri, juga termasuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dari Pemerintah Provinsi Riau dan instansi vertikal yang dilakukan

di Kota Pekanbaru. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dalam perekonomian Kota Pekanbaru adalah sebesar 8,93 persen.

Begitu besarnya permintaan baik untuk Pembentukan Modal tetap Bruto, Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga, dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah menyebabkan Kota Pekanbaru membutuhkan banyak komoditas dari luar wilayah untuk memenuhi berbagai permintaan tersebut. Akibatnya, Kota Pekanbaru mengalami Net Ekspor negatif atau defisit. Defisit ini ditutupi dengan kegiatan impor dari luar wilayah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga Net Ekspor di Kota Pekanbaru berkontribusi sebesar -56,49 persen terhadap total perekonomiannya. Net Ekspor negatif ini menunjukkan bahwa lebih banyak komoditas barang yang diimpor masuk ke Kota Pekanbaru dari pada yang diekspor ke luar wilayah. Kondisi Net Ekspor negatif di Kota Pekanbaru ini berbeda dengan perekonomian di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau yang mengalami Net Ekspor positif atau surplus.

Gambar 8. Distribusi PDRB Kota Pekanbaru Menurut Pengeluaran



Lampiran

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan
 3. Indeks Implisit
 4. Laju Pertumbuhan
 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit
 6. Kontribusi Komponen Per Kabupaten/Kota
 7. Kontribusi Kabupaten/Kota Per Komponen
-

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	21.476.719,67	24.021.736,43	25.194.883,23	27.520.610,72	29.517.007,71
INDRAGIRI HULU	29.872.282,45	33.762.481,76	34.583.595,62	37.031.211,86	38.738.283,90
INDRAGIRI HILIR	41.437.777,71	47.821.678,35	51.800.092,51	57.385.159,15	61.076.643,18
PELALAWAN	31.018.734,42	35.401.165,31	38.176.433,57	41.165.592,46	43.862.109,69
SIAK	82.129.724,43	85.735.522,14	77.235.572,31	78.943.502,57	79.613.198,07
KAMPAR	61.515.508,33	68.816.910,00	66.285.164,73	69.674.659,16	71.589.977,04
ROKAN HULU	21.645.415,45	25.355.416,52	26.907.158,04	29.130.669,23	31.037.808,47
BENGKALIS	156.624.440,27	165.899.036,53	135.504.919,07	132.314.261,27	133.035.527,36
ROKAN HILIR	65.200.092,05	74.545.552,92	70.692.968,31	73.359.605,60	74.551.551,53
KEP. MERANTI	13.100.964,46	15.127.124,09	15.151.635,81	16.044.433,42	16.731.422,67
PEKANBARU	60.492.459,55	73.841.218,20	83.663.984,07	92.380.249,90	101.343.860,79
DUMAI	21.231.766,16	23.628.466,85	25.453.569,61	27.975.396,02	30.304.350,75
JUMLAH	605.745.884,95	673.956.309,10	650.649.976,88	682.925.351,36	711.401.741,16
PROVINSI RIAU	607.498.449,77	679.395.859,59	652.761.630,87	682.290.502,07	705.678.594,41
DISKREPANSI	0,29	0,80	0,32	(0,09)	(0,81)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
KONSUMSI RUMAH TANGGA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	8.397.435,03	9.679.507,93	10.908.744,32	11.834.255,05	12.833.168,28
INDRAGIRI HULU	10.687.253,09	12.050.487,43	13.450.873,05	14.427.151,65	15.369.134,83
INDRAGIRI HILIR	17.704.828,32	20.171.848,75	22.599.135,07	24.310.471,77	26.297.564,31
PELALAWAN	8.735.826,39	9.955.059,37	11.136.434,28	12.049.738,43	12.926.670,46
SIAK	11.685.081,40	13.807.411,61	15.458.574,70	16.663.053,52	17.897.397,41
KAMPAR	21.245.780,62	24.579.081,31	28.154.154,64	30.779.576,87	33.239.430,86
ROKAN HULU	13.250.571,83	15.284.480,37	17.283.287,44	18.903.483,72	20.521.435,03
BENGKALIS	15.585.432,98	18.245.931,38	20.436.847,92	22.873.622,09	25.190.353,75
ROKAN HILIR	14.576.654,88	16.715.673,01	18.754.080,76	20.750.800,58	21.884.922,08
KEP. MERANTI	4.284.964,73	4.825.885,17	5.306.310,24	5.848.336,27	6.332.775,63
PEKANBARU	34.771.404,45	40.950.771,77	46.052.052,66	50.559.101,11	55.386.047,18
DUMAI	7.486.866,33	8.427.816,09	9.329.145,68	10.026.517,27	10.690.419,39
JUMLAH	168.412.100,04	194.693.954,19	218.869.640,75	239.026.108,32	258.569.319,21
PROVINSI RIAU	171.473.394,95	197.162.815,61	222.173.095,96	241.264.481,36	259.002.304,12
DISKREPANSI	1,79	1,25	1,49	0,93	0,17

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
KONSUMSI LNPRT ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	93.040,90	110.944,17	119.121,21	127.587,10	138.549,46
INDRAGIRI HULU	133.306,12	161.868,87	174.164,20	182.978,24	193.976,11
INDRAGIRI HILIR	223.673,40	272.897,46	291.182,05	301.864,96	329.641,19
PELALAWAN	112.131,77	127.637,63	134.573,48	141.841,14	150.812,47
SIAK	145.772,16	177.211,07	185.162,03	191.829,41	202.138,02
KAMPAR	253.750,44	309.755,11	331.864,13	349.742,33	380.474,11
ROKAN HULU	164.777,74	196.498,64	209.742,10	223.824,89	243.625,46
BENGKALIS	180.021,15	218.234,72	232.388,56	255.991,61	281.815,55
ROKAN HILIR	192.676,59	240.957,42	253.005,29	265.655,55	289.894,35
KEP. MERANTI	83.049,64	107.399,44	113.059,20	119.748,44	126.323,61
PEKANBARU	550.595,98	682.903,13	740.800,71	810.036,87	922.289,51
DUMAI	93.824,09	110.232,46	116.318,55	126.453,28	138.683,41
JUMLAH	2.226.619,98	2.716.540,12	2.901.381,51	3.097.553,81	3.398.223,26
PROVINSI RIAU	2.258.190,93	2.728.465,86	2.910.248,31	3.117.078,24	3.415.547,12
DISKREPANSI	1,40	0,44	0,30	0,63	0,51

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
KONSUMSI PEMERINTAH ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	975.126,64	971.976,14	1.123.261,62	1.294.093,49	1.365.315,65
INDRAGIRI HULU	1.080.138,41	1.064.583,78	1.185.175,79	1.373.464,27	1.466.064,95
INDRAGIRI HILIR	1.382.762,41	1.339.617,55	1.493.029,63	1.732.630,53	1.817.281,16
PELALAWAN	886.080,35	877.407,16	985.360,36	1.139.354,04	1.198.962,30
SIAK	1.485.913,66	1.455.649,69	1.642.929,92	1.962.952,95	2.095.382,61
KAMPAR	1.832.175,51	1.831.030,33	2.103.862,43	2.448.997,77	2.636.894,96
ROKAN HULU	1.014.571,52	1.036.266,37	1.164.796,91	1.369.870,07	1.445.324,75
BENGKALIS	2.253.912,62	2.175.678,06	2.544.727,34	3.015.528,16	3.209.592,98
ROKAN HILIR	1.301.106,82	1.229.103,59	1.352.751,41	1.585.387,52	1.672.729,69
KEP. MERANTI	426.133,01	422.643,55	466.584,08	532.501,16	564.175,55
PEKANBARU	6.766.986,23	6.645.466,36	7.561.122,79	8.551.287,54	9.049.665,70
DUMAI	1.534.033,96	1.509.825,51	1.664.600,13	1.934.178,67	2.024.687,35
JUMLAH	20.938.941,14	20.559.248,08	23.288.202,42	26.940.246,18	28.546.077,64
PROVINSI RIAU	21.227.801,18	20.562.897,64	23.462.836,56	27.314.688,51	28.775.183,52
DISKREPANSI	1,36	0,02	0,74	1,37	0,80

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PMTB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	8.448.997,47	9.805.937,60	11.360.934,99	12.709.695,37	13.682.314,56
INDRAGIRI HULU	9.824.331,96	11.150.899,22	12.641.499,78	13.909.229,96	14.940.315,29
INDRAGIRI HILIR	9.463.010,58	10.189.781,17	11.775.540,50	13.285.464,38	14.548.549,62
PELALAWAN	4.762.159,23	5.475.999,48	6.271.868,70	7.155.596,52	7.894.885,86
SIAK	10.787.123,82	12.661.637,26	14.510.889,61	16.465.686,41	17.929.651,58
KAMPAR	15.679.113,67	17.936.383,32	20.599.108,97	22.928.119,78	24.729.053,19
ROKAN HULU	4.555.814,00	5.261.787,62	6.095.462,40	6.903.221,84	7.541.004,02
BENGKALIS	13.753.043,96	16.081.621,05	18.540.222,43	20.724.107,13	22.549.150,99
ROKAN HILIR	4.508.258,88	5.046.381,53	5.844.098,46	6.674.046,91	7.302.364,17
KEP. MERANTI	2.860.309,07	2.895.008,87	3.239.182,51	3.561.672,00	3.878.153,03
PEKANBARU	53.036.148,66	62.226.918,05	73.910.498,31	84.879.638,93	92.428.005,26
DUMAI	10.828.356,46	11.225.919,14	12.393.856,75	13.643.256,21	14.742.023,31
JUMLAH	148.506.667,75	169.958.274,30	197.183.163,40	222.839.735,44	242.165.470,88
PROVINSI RIAU	147.933.949,92	173.219.855,23	198.061.291,74	221.468.183,21	238.512.077,76
DISKREPANSI	(0,39)	1,88	0,44	(0,62)	(1,53)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERUBAHAN INVENTORI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	1.284.756,71	1.152.331,63	(17.117,22)	(27.513,79)	(30.708,65)
INDRAGIRI HULU	1.788.606,94	1.921.453,77	554.223,96	688.403,04	386.771,59
INDRAGIRI HILIR	2.519.760,88	2.185.776,09	(285.865,09)	(48.291,83)	(21.070,30)
PELALAWAN	2.211.857,46	1.880.892,08	584.119,50	803.310,42	631.471,96
SIAK	4.904.787,14	4.271.993,53	901.438,85	1.667.175,23	458.518,72
KAMPAR	3.195.253,63	2.382.437,21	952.952,23	1.304.850,56	736.628,93
ROKAN HULU	1.405.104,38	1.207.336,57	350.980,10	544.255,58	209.464,88
BENGKALIS	8.321.055,28	5.054.895,43	357.590,80	462.191,54	119.556,40
ROKAN HILIR	3.717.997,32	2.999.641,56	2.020.258,59	2.833.637,38	802.641,09
KEP. MERANTI	906.106,88	899.317,67	48.002,99	73.193,78	40.826,47
PEKANBARU	3.664.057,06	4.248.672,45	1.155.872,05	1.973.024,52	810.748,36
DUMAI	1.248.071,52	1.337.477,39	831.617,13	1.375.908,20	968.421,58
JUMLAH	35.167.415,20	29.542.225,39	7.454.073,89	11.650.144,65	5.113.271,05
PROVINSI RIAU	35.401.415,82	30.133.338,53	7.365.023,32	11.838.354,40	5.056.471,01
DISKREPANSI	0,66	1,96	(1,21)	1,59	(1,12)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
EKSPOR ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	23.088.905,61	24.961.068,79	25.366.054,83	27.567.926,26	29.509.268,86
INDRAGIRI HULU	27.651.727,98	31.092.389,04	30.559.789,07	32.495.145,57	33.795.621,24
INDRAGIRI HILIR	37.676.264,61	46.559.139,51	51.784.163,52	57.341.913,08	60.316.339,82
PELALAWAN	41.757.007,53	47.947.829,41	51.023.986,93	53.492.692,99	58.070.121,52
SIAK	107.220.146,67	112.986.452,90	102.824.162,47	103.935.531,45	103.838.143,76
KAMPAR	64.388.404,19	71.270.474,18	80.754.750,44	80.066.432,00	74.074.585,92
ROKAN HULU	22.131.992,03	26.200.814,36	27.243.131,25	29.291.519,07	31.321.401,87
BENGKALIS	166.897.428,12	178.235.762,56	145.457.343,18	141.391.062,91	141.904.403,56
ROKAN HILIR	70.183.779,83	80.265.161,62	75.010.681,56	75.099.122,83	76.755.147,27
KEP. MERANTI	13.623.162,61	15.743.316,08	15.593.554,87	16.309.107,91	16.841.089,57
PEKANBARU	41.138.988,97	48.545.391,03	77.839.797,64	84.760.517,77	94.867.066,25
DUMAI	22.897.760,60	26.602.844,88	32.278.386,21	35.837.575,12	39.481.659,67
JUMLAH	638.655.568,75	710.410.644,35	715.735.801,98	737.588.546,96	760.774.849,31
PROVINSI RIAU	334.698.208,79	370.191.608,51	251.116.804,66	230.730.972,86	267.378.677,89

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
IMPOR ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	20.811.542,69	22.660.029,84	23.666.116,52	25.985.432,75	27.980.900,45
INDRAGIRI HULU	21.293.082,05	23.679.200,36	23.982.130,23	26.045.160,87	27.413.600,11
INDRAGIRI HILIR	27.532.522,49	32.897.382,18	35.857.093,17	39.538.893,74	42.211.662,62
PELALAWAN	27.446.328,31	30.863.659,82	31.959.909,67	33.616.941,08	37.010.814,87
SIAK	54.099.100,42	59.624.833,91	58.287.585,28	61.942.726,41	62.808.034,03
KAMPAR	45.078.969,73	49.492.251,47	66.611.528,10	68.203.060,15	64.207.090,94
ROKAN HULU	20.877.416,04	23.831.767,40	25.440.242,15	28.105.505,94	30.244.447,54
BENGKALIS	50.366.453,85	54.113.086,67	52.064.201,17	56.408.242,17	60.219.345,88
ROKAN HILIR	29.280.382,25	31.951.365,82	32.541.907,76	33.849.045,18	34.156.147,12
KEP. MERANTI	9.082.761,48	9.766.446,67	9.615.058,08	10.400.126,14	11.051.921,20
PEKANBARU	79.435.721,80	89.458.904,59	123.596.160,09	139.153.356,83	152.119.961,47
DUMAI	22.857.146,79	25.585.648,61	31.160.354,84	34.968.492,73	37.741.543,97
JUMLAH	408.161.427,90	453.924.577,34	514.782.287,07	558.216.984,00	587.165.470,19
PROVINSI RIAU	105.494.511,82	114.603.121,80	52.327.669,68	53.443.256,51	96.461.667,01

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
NET EKSPOR ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	2.277.362,92	2.301.038,95	1.699.938,31	1.582.493,50	1.528.368,41
INDRAGIRI HULU	6.358.645,93	7.413.188,68	6.577.658,84	6.449.984,70	6.382.021,13
INDRAGIRI HILIR	10.143.742,12	13.661.757,34	15.927.070,35	17.803.019,35	18.104.677,20
PELALAWAN	14.310.679,22	17.084.169,59	19.064.077,26	19.875.751,91	21.059.306,65
SIAK	53.121.046,25	53.361.618,98	44.536.577,19	41.992.805,05	41.030.109,73
KAMPAR	19.309.434,47	21.778.222,71	14.143.222,34	11.863.371,84	9.867.494,98
ROKAN HULU	1.254.575,99	2.369.046,96	1.802.889,10	1.186.013,12	1.076.954,33
BENGKALIS	116.530.974,27	124.122.675,88	93.393.142,01	84.982.820,74	81.685.057,69
ROKAN HILIR	40.903.397,58	48.313.795,80	42.468.773,80	41.250.077,65	42.599.000,15
KEP. MERANTI	4.540.401,13	5.976.869,40	5.978.496,79	5.908.981,77	5.789.168,38
PEKANBARU	(38.296.732,83)	(40.913.513,56)	(45.756.362,45)	(54.392.839,06)	(57.252.895,22)
DUMAI	40.613,80	1.017.196,27	1.118.031,37	869.082,39	1.740.115,70
JUMLAH	230.494.140,84	256.486.067,01	200.953.514,91	179.371.562,96	173.609.379,12
PROVINSI RIAU	229.203.696,97	255.588.486,71	198.789.134,98	177.287.716,35	170.917.010,87
DISKREPANSI	(0,56)	(0,35)	(1,09)	(1,18)	(1,58)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	19.336.933,71	20.331.154,81	19.896.348,12	20.669.051,52	21.583.844,37
INDRAGIRI HULU	25.180.129,97	26.571.896,38	25.791.527,40	26.741.577,11	27.816.420,55
INDRAGIRI HILIR	34.769.508,24	37.160.800,90	37.923.472,25	39.758.402,64	41.627.466,09
PELALAWAN	27.360.638,95	29.058.309,27	29.774.301,57	30.654.906,26	31.911.291,78
SIAK	51.987.673,97	51.485.182,58	51.379.296,29	51.558.228,66	52.044.935,65
KAMPAR	44.297.582,79	45.816.465,83	46.314.066,60	47.609.043,87	49.042.587,29
ROKAN HULU	19.150.561,51	20.396.303,11	20.800.664,35	21.785.244,96	22.996.276,91
BENGKALIS	88.411.085,59	85.003.796,73	82.676.674,31	80.656.528,98	79.230.434,69
ROKAN HILIR	42.405.063,91	44.445.781,75	44.676.806,30	45.605.251,42	46.529.651,43
KEP. MERANTI	10.329.760,17	10.788.977,45	11.096.269,32	11.451.310,68	11.831.782,17
PEKANBARU	51.053.167,00	54.575.479,50	57.616.752,66	61.047.255,22	64.768.715,40
DUMAI	19.605.667,85	20.132.375,72	20.541.693,52	21.401.003,79	22.352.640,53
JUMLAH	433.887.773,64	445.766.524,04	448.487.872,69	458.937.805,11	471.736.046,86
PROVINSI RIAU	436.187.507,42	447.986.782,47	448.991.963,52	458.997.361,07	471.419.903,33
DISKREPANSI	0,53	0,50	0,11	0,01	(0,07)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
KONSUMSI RUMAH TANGGA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	6.495.694,48	6.893.903,84	7.341.639,64	7.739.284,20	8.132.887,23
INDRAGIRI HULU	8.528.675,20	9.001.391,67	9.415.065,24	9.826.233,44	10.179.669,43
INDRAGIRI HILIR	14.009.485,41	14.753.859,25	15.552.124,50	16.220.977,04	16.964.516,49
PELALAWAN	6.847.466,97	7.295.542,49	7.685.352,25	8.061.343,32	8.364.010,02
SIAK	8.580.302,57	9.181.935,23	9.708.187,29	10.178.343,69	10.628.219,05
KAMPAR	16.204.049,91	17.412.643,40	18.728.531,58	19.862.177,97	20.879.444,81
ROKAN HULU	10.170.086,57	10.868.217,07	11.568.919,46	12.269.230,94	12.987.393,88
BENGKALIS	11.797.110,67	12.693.835,64	13.471.029,20	14.487.519,33	15.377.202,96
ROKAN HILIR	11.212.663,32	11.935.167,45	12.610.864,24	13.286.774,08	13.735.221,97
KEP. MERANTI	3.438.468,37	3.637.688,37	3.820.905,08	4.013.832,83	4.192.833,41
PEKANBARU	26.467.089,27	28.466.199,13	30.138.958,14	31.921.931,60	33.616.297,91
DUMAI	5.930.453,96	6.246.229,23	6.571.914,42	6.856.034,61	7.121.368,12
JUMLAH	129.681.546,71	138.386.612,78	146.613.491,02	154.723.683,06	162.179.065,28
PROVINSI RIAU	131.131.818,39	140.479.393,08	148.856.385,60	156.857.835,43	164.001.805,43
DISKREPANSI	1,11	1,49	1,51	1,36	1,11

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
KONSUMSI LNPRT ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	76.132,68	86.958,75	87.675,73	89.995,49	93.586,31
INDRAGIRI HULU	102.762,03	119.015,24	120.798,62	122.493,14	125.314,66
INDRAGIRI HILIR	174.676,47	200.164,21	198.732,24	197.659,09	205.928,44
PELALAWAN	89.722,73	98.921,06	99.345,16	101.259,06	104.149,17
SIAK	114.102,00	130.971,75	131.255,68	132.382,65	135.444,94
KAMPAR	197.830,27	228.137,86	230.051,89	234.560,91	244.529,75
ROKAN HULU	128.130,67	146.123,10	149.315,45	152.960,33	159.495,16
BENGKALIS	142.403,35	164.786,87	165.064,15	171.068,16	178.649,65
ROKAN HILIR	149.581,15	172.817,82	174.545,99	176.274,17	186.268,92
KEP. MERANTI	62.898,59	72.025,46	72.431,81	73.835,52	75.884,21
PEKANBARU	427.896,82	492.545,99	502.987,96	536.939,65	580.839,83
DUMAI	73.739,06	84.089,25	85.761,01	88.850,23	92.841,64
JUMLAH	1.739.875,82	1.996.557,35	2.017.965,70	2.078.278,39	2.182.932,67
PROVINSI RIAU	1.755.960,06	2.027.080,50	2.032.936,70	2.086.725,03	2.181.901,98
DISKREPANSI	0,92	1,51	0,74	0,40	(0,05)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
KONSUMSI PEMERINTAH ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	839.046,59	819.253,38	848.858,88	860.191,68	860.449,73
INDRAGIRI HULU	922.571,31	917.465,48	948.685,14	979.300,86	1.007.702,31
INDRAGIRI HILIR	1.195.188,23	1.170.106,05	1.201.818,99	1.227.175,68	1.259.260,98
PELALAWAN	768.313,14	759.160,07	783.485,45	804.095,49	819.527,15
SIAK	1.240.372,82	1.211.797,86	1.254.360,39	1.290.758,42	1.319.385,24
KAMPAR	1.609.111,85	1.616.952,66	1.706.485,70	1.743.584,71	1.797.112,76
ROKAN HULU	883.994,95	880.345,86	910.165,00	932.530,00	960.653,49
BENGKALIS	1.857.429,52	1.802.446,97	1.919.661,32	2.028.361,29	2.085.810,97
ROKAN HILIR	1.166.061,60	1.141.973,59	1.164.813,06	1.187.652,53	1.219.244,09
KEP. MERANTI	365.257,10	364.913,28	372.433,04	376.385,47	383.864,25
PEKANBARU	6.005.830,21	5.868.760,06	5.971.463,36	5.863.977,02	6.042.828,31
DUMAI	1.415.616,54	1.388.523,84	1.410.130,75	1.425.967,91	1.455.395,93
JUMLAH	18.268.793,88	17.941.699,11	18.492.361,08	18.719.981,06	19.211.235,21
PROVINSI RIAU	18.317.421,49	17.795.785,47	18.419.222,99	18.665.131,11	19.193.787,27
DISKREPANSI	0,27	(0,82)	(0,40)	(0,29)	(0,09)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PMTB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	7.204.245,26	7.375.722,51	7.653.071,28	7.929.213,10	8.119.686,45
INDRAGIRI HULU	8.519.907,12	8.760.058,41	9.059.504,41	9.324.753,05	9.653.686,30
INDRAGIRI HILIR	7.415.485,10	7.367.451,05	7.586.514,56	7.902.366,71	8.253.301,08
PELALAWAN	4.172.437,11	4.265.963,52	4.459.131,67	4.687.053,87	4.923.926,97
SIAK	9.374.079,65	9.787.538,58	10.143.172,15	10.485.276,49	10.970.494,78
KAMPAR	13.343.734,06	13.591.552,58	13.981.165,60	14.514.233,47	15.028.330,32
ROKAN HULU	3.910.911,97	3.986.849,57	4.116.092,42	4.295.399,50	4.507.038,63
BENGKALIS	11.106.192,61	11.728.949,46	12.108.800,14	12.596.332,68	13.041.217,96
ROKAN HILIR	3.822.445,61	3.898.211,92	4.120.221,26	4.375.473,57	4.571.012,25
KEP. MERANTI	2.422.327,28	2.204.912,90	2.277.056,96	2.344.080,30	2.426.247,56
PEKANBARU	45.156.639,26	46.238.443,93	49.166.852,92	51.616.762,15	54.204.441,67
DUMAI	9.776.973,83	9.227.047,35	9.345.377,23	9.518.700,38	9.760.670,04
JUMLAH	126.225.378,86	128.432.701,78	134.016.960,59	139.589.645,27	145.460.054,01
PROVINSI RIAU	127.338.483,49	129.639.728,17	134.850.260,45	139.706.389,14	144.910.519,02
DISKREPANSI	0,87	0,93	0,62	0,08	(0,38)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERUBAHAN INVENTORI ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	684.384,73	436.551,17	(6.694,77)	(7.670,33)	(7.671,10)
INDRAGIRI HULU	1.099.778,77	812.841,63	275.631,01	249.793,74	184.916,23
INDRAGIRI HILIR	1.308.975,31	981.517,39	(163.212,99)	(21.190,99)	(16.118,05)
PELALAWAN	1.214.034,35	937.229,55	366.485,47	403.820,21	379.372,95
SIAK	1.897.082,45	1.397.362,68	368.498,84	459.994,92	318.114,28
KAMPAR	1.288.691,01	870.947,39	441.500,74	494.922,31	410.241,11
ROKAN HULU	598.902,02	454.384,53	176.617,43	200.337,15	143.330,87
BENGKALIS	1.851.810,18	978.875,31	93.283,17	90.177,49	69.036,31
ROKAN HILIR	1.234.685,05	723.365,07	651.028,56	578.692,05	461.408,53
KEP. MERANTI	486.628,75	392.123,94	22.202,98	24.969,03	20.464,65
PEKANBARU	2.437.685,45	2.359.683,63	915.170,72	1.108.232,70	551.227,73
DUMAI	860.915,27	824.714,38	544.011,70	569.840,98	493.675,80
JUMLAH	14.963.573,35	11.169.596,66	3.684.522,85	4.151.919,25	3.007.999,31
PROVINSI RIAU	14.950.461,59	11.199.137,72	3.663.055,64	4.196.836,40	2.958.093,60
DISKREPANSI	(0,09)	0,26	(0,59)	1,07	(1,69)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
EKSPOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	22.520.669,40	23.629.448,38	23.530.130,10	23.326.090,97	25.147.215,92
INDRAGIRI HULU	24.829.066,20	26.719.261,64	24.864.792,71	26.709.210,59	28.211.001,46
INDRAGIRI HILIR	34.928.471,23	40.658.953,09	41.629.461,43	45.198.104,75	48.011.687,08
PELALAWAN	38.670.919,78	40.795.491,79	42.255.311,72	43.083.160,91	45.036.303,48
SIAK	75.856.798,66	75.282.601,07	73.675.124,93	73.934.287,17	74.291.711,54
KAMPAR	50.533.887,81	52.202.045,43	63.670.008,64	65.158.136,68	57.844.398,60
ROKAN HULU	22.185.888,16	23.788.229,97	25.070.729,27	27.325.318,37	29.399.027,10
BENGKALIS	100.918.116,74	96.973.339,11	93.251.525,17	93.278.301,90	93.587.084,43
ROKAN HILIR	49.612.817,51	51.904.202,83	47.205.299,54	49.631.353,20	56.494.000,44
KEP. MERANTI	12.157.858,73	12.613.080,15	12.990.139,41	12.774.249,74	13.411.052,49
PEKANBARU	37.693.181,78	43.430.893,71	66.151.688,50	77.331.308,34	86.954.478,98
DUMAI	19.755.801,68	20.990.892,12	25.387.973,37	28.648.664,53	31.253.504,49
JUMLAH	489.663.477,66	508.988.439,27	539.682.184,81	566.398.187,14	589.641.466,00
PROVINSI RIAU	285.085.390,07	242.929.360,49	200.076.979,19	179.778.780,19	201.854.653,29

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
IMPOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	18.483.239,43	18.910.683,22	19.558.332,74	19.268.053,59	20.762.310,18
INDRAGIRI HULU	18.822.630,66	19.758.137,69	18.892.949,73	20.470.207,71	21.545.869,85
INDRAGIRI HILIR	24.262.773,51	27.971.250,13	28.081.966,48	30.966.689,64	33.051.109,93
PELALAWAN	24.402.255,14	25.093.999,21	25.874.810,15	26.485.826,61	27.715.997,96
SIAK	45.075.064,18	45.507.024,59	43.901.302,99	44.922.814,68	45.618.434,18
KAMPAR	38.879.722,11	40.105.813,49	52.443.677,54	54.398.572,18	47.161.470,04
ROKAN HULU	18.727.352,84	19.727.846,99	21.191.174,68	23.390.531,32	25.160.662,22
BENGKALIS	39.261.977,48	39.338.436,63	38.332.688,85	41.995.231,86	45.108.567,57
ROKAN HILIR	24.793.190,32	25.329.956,92	21.249.966,35	23.630.968,19	30.137.504,78
KEP. MERANTI	8.603.678,67	8.495.766,64	8.458.899,96	8.156.042,21	8.678.564,40
PEKANBARU	67.135.155,79	72.281.046,95	95.230.368,94	107.331.896,23	117.181.399,02
DUMAI	18.207.832,49	18.629.120,45	22.803.474,96	25.707.054,86	27.824.815,49
JUMLAH	346.654.872,63	361.149.082,90	396.019.613,36	426.723.889,07	449.946.705,62
PROVINSI RIAU	142.392.027,68	96.083.702,95	58.906.877,06	42.294.336,24	63.680.857,25

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
NET EKSPOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	4.037.429,97	4.718.765,16	3.971.797,36	4.058.037,39	4.384.905,74
INDRAGIRI HULU	6.006.435,54	6.961.123,95	5.971.842,98	6.239.002,88	6.665.131,62
INDRAGIRI HILIR	10.665.697,72	12.687.702,96	13.547.494,96	14.231.415,11	14.960.577,15
PELALAWAN	14.268.664,63	15.701.492,58	16.380.501,57	16.597.334,30	17.320.305,52
SIAK	30.781.734,48	29.775.576,47	29.773.821,94	29.011.472,49	28.673.277,36
KAMPAR	11.654.165,69	12.096.231,94	11.226.331,10	10.759.564,50	10.682.928,56
ROKAN HULU	3.458.535,32	4.060.382,98	3.879.554,59	3.934.787,04	4.238.364,88
BENGKALIS	61.656.139,26	57.634.902,48	54.918.836,33	51.283.070,04	48.478.516,85
ROKAN HILIR	24.819.627,18	26.574.245,91	25.955.333,19	26.000.385,01	26.356.495,66
KEP. MERANTI	3.554.180,06	4.117.313,51	4.531.239,45	4.618.207,53	4.732.488,09
PEKANBARU	(29.441.974,01)	(28.850.153,24)	(29.078.680,44)	(30.000.587,90)	(30.226.920,04)
DUMAI	1.547.969,19	2.361.771,67	2.584.498,41	2.941.609,68	3.428.689,00
JUMLAH	143.008.605,03	147.839.356,37	143.662.571,44	139.674.298,07	139.694.760,38
PROVINSI RIAU	142.693.362,39	146.845.657,53	141.170.102,14	137.484.443,96	138.173.796,04
DISKREPANSI	(0,22)	(0,68)	(1,77)	(1,59)	(1,10)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	111,07	118,15	126,63	133,15	136,76
INDRAGIRI HULU	118,63	127,06	134,09	138,48	139,26
INDRAGIRI HILIR	119,18	128,69	136,59	144,33	146,72
PELALAWAN	113,37	121,83	128,22	134,29	137,45
SIAK	157,98	166,52	150,32	153,12	152,97
KAMPAR	138,87	150,20	143,12	146,35	145,98
ROKAN HULU	113,03	124,31	129,36	133,72	134,97
BENGKALIS	177,15	195,17	163,90	164,05	167,91
ROKAN HILIR	153,76	167,72	158,23	160,86	160,22
KEP. MERANTI	126,83	140,21	136,55	140,11	141,41
PEKANBARU	118,49	135,30	145,21	151,33	156,47
DUMAI	108,29	117,37	123,91	130,72	135,57
JUMLAH	139,61	151,19	145,08	148,81	150,81
PROVINSI RIAU	139,27	151,66	145,38	148,65	149,69

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT KONSUMSI RUMAH TANGGA

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	129,28	140,41	148,59	152,91	157,79
INDRAGIRI HULU	125,31	133,87	142,87	146,82	150,98
INDRAGIRI HILIR	126,38	136,72	145,31	149,87	155,02
PELALAWAN	127,58	136,45	144,90	149,48	154,55
SIAK	136,18	150,38	159,23	163,71	168,40
KAMPAR	131,11	141,16	150,33	154,97	159,20
ROKAN HULU	130,29	140,63	149,39	154,07	158,01
BENGKALIS	132,11	143,74	151,71	157,89	163,82
ROKAN HILIR	130,00	140,05	148,71	156,18	159,33
KEP. MERANTI	124,62	132,66	138,88	145,70	151,04
PEKANBARU	131,38	143,86	152,80	158,38	164,76
DUMAI	126,24	134,93	141,95	146,24	150,12
JUMLAH	129,87	140,69	149,28	154,49	159,43
PROVINSI RIAU	130,76	140,35	149,25	153,81	157,93

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT KONSUMSI LNPRT

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	122,21	127,58	135,87	141,77	148,04
INDRAGIRI HULU	129,72	136,01	144,18	149,38	154,79
INDRAGIRI HILIR	128,05	136,34	146,52	152,72	160,08
PELALAWAN	124,98	129,03	135,46	140,08	144,80
SIAK	127,76	135,30	141,07	144,91	149,24
KAMPAR	128,27	135,78	144,26	149,11	155,59
ROKAN HULU	128,60	134,47	140,47	146,33	152,75
BENGKALIS	126,42	132,43	140,79	149,64	157,75
ROKAN HILIR	128,81	139,43	144,95	150,71	155,63
KEP. MERANTI	132,04	149,11	156,09	162,18	166,47
PEKANBARU	128,67	138,65	147,28	150,86	158,79
DUMAI	127,24	131,09	135,63	142,32	149,38
JUMLAH	127,98	136,06	143,78	149,04	155,67
PROVINSI RIAU	128,60	134,60	143,15	149,38	156,54

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT KONSUMSI PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	116,22	118,64	132,33	150,44	158,67
INDRAGIRI HULU	117,08	116,04	124,93	140,25	145,49
INDRAGIRI HILIR	115,69	114,49	124,23	141,19	144,31
PELALAWAN	115,33	115,58	125,77	141,69	146,30
SIAK	119,80	120,12	130,98	152,08	158,82
KAMPAR	113,86	113,24	123,29	140,46	146,73
ROKAN HULU	114,77	117,71	127,98	146,90	150,45
BENGKALIS	121,35	120,71	132,56	148,67	153,88
ROKAN HILIR	111,58	107,63	116,13	133,49	137,19
KEP. MERANTI	116,67	115,82	125,28	141,48	146,97
PEKANBARU	112,67	113,23	126,62	145,83	149,76
DUMAI	108,37	108,74	118,05	135,64	139,12
JUMLAH	114,62	114,59	125,93	143,91	148,59
PROVINSI RIAU	115,89	115,55	127,38	146,34	149,92

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT PMTB

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	117,28	132,95	148,45	160,29	168,51
INDRAGIRI HULU	115,31	127,29	139,54	149,16	154,76
INDRAGIRI HILIR	127,61	138,31	155,22	168,12	176,28
PELALAWAN	114,13	128,36	140,65	152,67	160,34
SIAK	115,07	129,36	143,06	157,04	163,44
KAMPAR	117,50	131,97	147,33	157,97	164,55
ROKAN HULU	116,49	131,98	148,09	160,71	167,32
BENGKALIS	123,83	137,11	153,11	164,52	172,91
ROKAN HILIR	117,94	129,45	141,84	152,53	159,75
KEP. MERANTI	118,08	131,30	142,25	151,94	159,84
PEKANBARU	117,45	134,58	150,33	164,44	170,52
DUMAI	110,75	121,66	132,62	143,33	151,03
JUMLAH	117,65	132,33	147,13	159,64	166,48
PROVINSI RIAU	116,17	133,62	146,87	158,52	164,59

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT PERUBAHAN INVENTORI

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	187,72	263,96	255,68	358,70	400,32
INDRAGIRI HULU	162,63	236,39	201,07	275,59	209,16
INDRAGIRI HILIR	192,50	222,69	175,15	227,89	130,72
PELALAWAN	182,19	200,69	159,38	198,93	166,45
SIAK	258,54	305,72	244,62	362,43	144,14
KAMPAR	247,95	273,55	215,84	263,65	179,56
ROKAN HULU	234,61	265,71	198,72	271,67	146,14
BENGKALIS	449,35	516,40	383,34	512,54	173,18
ROKAN HILIR	301,13	414,68	310,32	489,66	173,95
KEP. MERANTI	186,20	229,35	216,20	293,14	199,50
PEKANBARU	150,31	180,05	126,30	178,03	147,08
DUMAI	144,97	162,17	152,87	241,45	196,17
JUMLAH	235,02	264,49	202,31	280,60	169,99
PROVINSI RIAU	236,79	269,07	201,06	282,08	170,94

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT EKSPOR

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	102,52	105,64	107,80	118,18	117,35
INDRAGIRI HULU	111,37	116,37	122,90	121,66	119,80
INDRAGIRI HILIR	107,87	114,51	124,39	126,87	125,63
PELALAWAN	107,98	117,53	120,75	124,16	128,94
SIAK	141,35	150,08	139,56	140,58	139,77
KAMPAR	127,42	136,53	126,83	122,88	128,06
ROKAN HULU	99,76	110,14	108,67	107,20	106,54
BENGKALIS	165,38	183,80	155,98	151,58	151,63
ROKAN HILIR	141,46	154,64	158,90	151,31	135,86
KEP. MERANTI	112,05	124,82	120,04	127,67	125,58
PEKANBARU	109,14	111,78	117,67	109,61	109,10
DUMAI	115,90	126,74	127,14	125,09	126,33
JUMLAH	130,43	139,57	132,62	130,22	129,02
PROVINSI RIAU	117,40	152,39	125,51	128,34	132,46

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT IMPOR

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	112,60	119,83	121,00	134,86	134,77
INDRAGIRI HULU	113,12	119,85	126,94	127,23	127,23
INDRAGIRI HILIR	113,48	117,61	127,69	127,68	127,72
PELALAWAN	112,47	122,99	123,52	126,92	133,54
SIAK	120,02	131,02	132,77	137,89	137,68
KAMPAR	115,94	123,40	127,02	125,38	136,14
ROKAN HULU	111,48	120,80	120,05	120,16	120,21
BENGKALIS	128,28	137,56	135,82	134,32	133,50
ROKAN HILIR	118,10	126,14	153,14	143,24	113,33
KEP. MERANTI	105,57	114,96	113,67	127,51	127,35
PEKANBARU	118,32	123,77	129,79	129,65	129,82
DUMAI	125,53	137,34	136,65	136,03	135,64
JUMLAH	117,74	125,69	129,99	130,81	130,50
PROVINSI RIAU	74,09	119,27	88,83	126,36	151,48

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
INDEKS IMPLISIT NET EKSPOR

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	56,41	48,76	42,80	39,00	34,86
INDRAGIRI HULU	105,86	106,49	110,14	103,38	95,75
INDRAGIRI HILIR	95,11	107,68	117,56	125,10	121,02
PELALAWAN	100,29	108,81	116,38	119,75	121,59
SIAK	172,57	179,21	149,58	144,75	143,10
KAMPAR	165,69	180,04	125,98	110,26	92,37
ROKAN HULU	36,27	58,35	46,47	30,14	25,41
BENGKALIS	189,00	215,36	170,06	165,71	168,50
ROKAN HILIR	164,80	181,81	163,62	158,65	161,63
KEP. MERANTI	127,75	145,16	131,94	127,95	122,33
PEKANBARU	130,08	141,81	157,35	181,31	189,41
DUMAI	2,62	43,07	43,26	29,54	50,75
JUMLAH	161,18	173,49	139,88	128,42	124,28
PROVINSI RIAU	160,63	174,05	140,82	128,95	123,70

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	5,47	5,14	(2,14)	3,88	4,43
INDRAGIRI HULU	6,21	5,53	(2,94)	3,68	4,02
INDRAGIRI HILIR	7,17	6,88	2,05	4,84	4,70
PELALAWAN	5,55	6,20	2,46	2,96	4,10
SIAK	(2,33)	(0,97)	(0,21)	0,35	0,94
KAMPAR	6,31	3,43	1,09	2,80	3,01
ROKAN HULU	5,99	6,50	1,98	4,73	5,56
BENGKALIS	(3,27)	(3,85)	(2,74)	(2,44)	(1,77)
ROKAN HILIR	2,38	4,81	0,52	2,08	2,03
KEP. MERANTI	4,24	4,45	2,85	3,20	3,32
PEKANBARU	5,59	6,90	5,57	5,95	6,10
DUMAI	3,68	2,69	2,03	4,18	4,45
JUMLAH	2,49	2,74	0,61	2,33	2,79
PROVINSI RIAU	2,48	2,71	0,22	2,23	2,71

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	6,12	6,13	6,49	5,42	5,09
INDRAGIRI HULU	5,89	5,54	4,60	4,37	3,60
INDRAGIRI HILIR	4,44	5,31	5,41	4,30	4,58
PELALAWAN	6,06	6,54	5,34	4,89	3,75
SIAK	7,59	7,01	5,73	4,84	4,42
KAMPAR	6,95	7,46	7,56	6,05	5,12
ROKAN HULU	6,49	6,86	6,45	6,05	5,85
BENGKALIS	6,91	7,60	6,12	7,55	6,14
ROKAN HILIR	6,44	6,44	5,66	5,36	3,38
KEP. MERANTI	5,90	5,79	5,04	5,05	4,46
PEKANBARU	6,66	7,55	5,88	5,92	5,31
DUMAI	5,45	5,32	5,21	4,32	3,87
JUMLAH	6,32	6,71	5,94	5,53	4,82
PROVINSI RIAU	6,75	7,13	5,96	5,38	4,55

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN KONSUMSI LNPRT (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	7,65	14,22	0,82	2,65	3,99
INDRAGIRI HULU	5,21	15,82	1,50	1,40	2,30
INDRAGIRI HILIR	8,79	14,59	(0,72)	(0,54)	4,18
PELALAWAN	7,05	10,25	0,43	1,93	2,85
SIAK	7,95	14,78	0,22	0,86	2,31
KAMPAR	7,91	15,32	0,84	1,96	4,25
ROKAN HULU	7,45	14,04	2,18	2,44	4,27
BENGKALIS	6,49	15,72	0,17	3,64	4,43
ROKAN HILIR	4,09	15,53	1,00	0,99	5,67
KEP. MERANTI	5,91	14,51	0,56	1,94	2,77
PEKANBARU	9,66	15,11	2,12	6,75	8,18
DUMAI	5,66	14,04	1,99	3,60	4,49
JUMLAH	7,54	14,75	1,07	2,99	5,04
PROVINSI RIAU	8,09	15,44	0,29	2,65	4,56

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN KONSUMSI PEMERINTAH (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	5,69	(2,36)	3,61	1,34	0,03
INDRAGIRI HULU	5,99	(0,55)	3,40	3,23	2,90
INDRAGIRI HILIR	4,40	(2,10)	2,71	2,11	2,61
PELALAWAN	7,41	(1,19)	3,20	2,63	1,92
SIAK	9,55	(2,30)	3,51	2,90	2,22
KAMPAR	8,63	0,49	5,54	2,17	3,07
ROKAN HULU	7,26	(0,41)	3,39	2,46	3,02
BENGKALIS	6,93	(2,96)	6,50	5,66	2,83
ROKAN HILIR	4,60	(2,07)	2,00	1,96	2,66
KEP. MERANTI	4,68	(0,09)	2,06	1,06	1,99
PEKANBARU	8,45	(2,28)	1,75	(1,80)	3,05
DUMAI	5,38	(1,91)	1,56	1,12	2,06
JUMLAH	7,18	(1,79)	3,07	1,23	2,62
PROVINSI RIAU	8,75	(2,85)	3,50	1,34	2,83

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN PMTB (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	7,63	2,38	3,76	3,61	2,40
INDRAGIRI HULU	5,34	2,82	3,42	2,93	3,53
INDRAGIRI HILIR	5,25	(0,65)	2,97	4,16	4,44
PELALAWAN	3,80	2,24	4,53	5,11	5,05
SIAK	7,60	4,41	3,63	3,37	4,63
KAMPAR	4,87	1,86	2,87	3,81	3,54
ROKAN HULU	3,43	1,94	3,24	4,36	4,93
BENGKALIS	1,53	5,61	3,24	4,03	3,53
ROKAN HILIR	3,37	1,98	5,70	6,20	4,47
KEP. MERANTI	4,94	(8,98)	3,27	2,94	3,51
PEKANBARU	5,93	2,40	6,33	4,98	5,01
DUMAI	5,52	(5,62)	1,28	1,85	2,54
JUMLAH	5,27	1,75	4,35	4,16	4,21
PROVINSI RIAU	5,18	1,81	4,02	3,60	3,73

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN PERUBAHAN INVENTORI (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	(17,47)	(36,21)	(101,53)	14,57	0,01
INDRAGIRI HULU	(19,41)	(26,09)	(66,09)	(9,37)	(25,97)
INDRAGIRI HILIR	(26,61)	(25,02)	(116,63)	(87,02)	(23,94)
PELALAWAN	(17,38)	(22,80)	(60,90)	10,19	(6,05)
SIAK	(30,26)	(26,34)	(73,63)	24,83	(30,84)
KAMPAR	(45,40)	(32,42)	(49,31)	12,10	(17,11)
ROKAN HULU	(28,55)	(24,13)	(61,13)	13,43	(28,46)
BENGKALIS	(38,70)	(47,14)	(90,47)	(3,33)	(23,44)
ROKAN HILIR	(23,80)	(41,41)	(10,00)	(11,11)	(20,27)
KEP. MERANTI	(14,88)	(19,42)	(94,34)	12,46	(18,04)
PEKANBARU	(12,53)	(3,20)	(61,22)	21,10	(50,26)
DUMAI	(12,42)	(4,20)	(34,04)	4,75	(13,37)
JUMLAH	(26,46)	(25,35)	(67,01)	12,69	(27,55)
PROVINSI RIAU	(27,44)	(25,09)	(67,29)	14,57	(29,52)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN EKSPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	4,18	4,92	(0,42)	(0,87)	7,81
INDRAGIRI HULU	8,58	7,61	(6,94)	7,42	5,62
INDRAGIRI HILIR	9,89	16,41	2,39	8,57	6,23
PELALAWAN	4,96	5,49	3,58	1,96	4,53
SIAK	1,63	(0,76)	(2,14)	0,35	0,48
KAMPAR	10,17	3,30	21,97	2,34	(11,22)
ROKAN HULU	9,13	7,22	5,39	8,99	7,59
BENGKALIS	0,52	(3,91)	(3,84)	0,03	0,33
ROKAN HILIR	6,06	4,62	(9,05)	5,14	13,83
KEP. MERANTI	5,48	3,74	2,99	(1,66)	4,99
PEKANBARU	7,07	15,22	52,31	16,90	12,44
DUMAI	4,60	6,25	20,95	12,84	9,09
JUMLAH	4,91	3,95	6,03	4,95	4,10
PROVINSI RIAU	(7,36)	(14,79)	(17,64)	(10,15)	12,28

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN IMPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	3,88	2,31	3,42	(1,48)	7,76
INDRAGIRI HULU	6,74	4,97	(4,38)	8,35	5,25
INDRAGIRI HILIR	6,01	15,28	0,40	10,27	6,73
PELALAWAN	3,11	2,83	3,11	2,36	4,64
SIAK	7,18	0,96	(3,53)	2,33	1,55
KAMPAR	7,70	3,15	30,76	3,73	(13,30)
ROKAN HULU	7,80	5,34	7,42	10,38	7,57
BENGKALIS	9,47	0,19	(2,56)	9,55	7,41
ROKAN HILIR	10,34	2,16	(16,11)	11,20	27,53
KEP. MERANTI	5,55	(1,25)	(0,43)	(3,58)	6,41
PEKANBARU	6,54	7,66	31,75	12,71	9,18
DUMAI	5,48	2,31	22,41	12,73	8,24
JUMLAH	6,90	4,18	9,66	7,75	5,44
PROVINSI RIAU	(13,76)	(32,52)	(38,69)	(28,20)	50,57

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN NET EKSPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	5,55	16,88	(15,83)	2,17	8,05
INDRAGIRI HULU	14,77	15,89	(14,21)	4,47	6,83
INDRAGIRI HILIR	19,90	18,96	6,78	5,05	5,12
PELALAWAN	8,29	10,04	4,32	1,32	4,36
SIAK	(5,53)	(3,27)	(0,01)	(2,56)	(1,17)
KAMPAR	19,30	3,79	(7,19)	(4,16)	(0,71)
ROKAN HULU	16,99	17,40	(4,45)	1,42	7,72
BENGKALIS	(4,46)	(6,52)	(4,71)	(6,62)	(5,47)
ROKAN HILIR	2,11	7,07	(2,33)	0,17	1,37
KEP. MERANTI	5,33	15,84	10,05	1,92	2,47
PEKANBARU	5,88	(2,01)	0,79	3,17	0,75
DUMAI	(4,68)	52,57	9,43	13,82	16,56
JUMLAH	0,38	3,38	(2,83)	(2,78)	0,01
PROVINSI RIAU	0,03	2,91	(3,86)	(2,61)	0,50

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	2,05	6,38	7,18	5,15	2,71
INDRAGIRI HULU	2,38	7,10	5,53	3,27	0,57
INDRAGIRI HILIR	2,58	7,98	6,14	5,67	1,65
PELALAWAN	1,28	7,46	5,25	4,73	2,36
SIAK	6,03	5,41	(9,73)	1,86	(0,09)
KAMPAR	7,99	8,16	(4,71)	2,25	(0,25)
ROKAN HULU	2,28	9,99	4,06	3,37	0,94
BENGKALIS	14,32	10,17	(16,02)	0,09	2,35
ROKAN HILIR	8,02	9,08	(5,66)	1,66	(0,39)
KEP. MERANTI	6,15	10,55	(2,61)	2,61	0,93
PEKANBARU	2,87	14,19	7,32	4,21	3,40
DUMAI	8,03	8,38	5,58	5,49	3,71
JUMLAH	6,67	8,30	(4,04)	2,57	1,34
PROVINSI RIAU	6,14	8,89	(4,14)	2,25	0,70

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT KONSUMSI RUMAH TANGGA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	7,62	8,61	5,83	2,91	3,19
INDRAGIRI HULU	6,24	6,83	6,72	2,77	2,83
INDRAGIRI HILIR	7,56	8,19	6,28	3,14	3,43
PELALAWAN	7,22	6,96	6,19	3,15	3,40
SIAK	9,42	10,42	5,89	2,81	2,86
KAMPAR	7,76	7,66	6,50	3,09	2,73
ROKAN HULU	7,66	7,94	6,23	3,13	2,56
BENGKALIS	8,15	8,80	5,55	4,07	3,76
ROKAN HILIR	8,45	7,73	6,18	5,02	2,02
KEP. MERANTI	6,98	6,46	4,68	4,92	3,66
PEKANBARU	7,77	9,50	6,22	3,65	4,03
DUMAI	6,60	6,88	5,21	3,02	2,65
JUMLAH	7,75	8,33	6,11	3,48	3,20
PROVINSI RIAU	7,81	7,33	6,34	3,05	2,68

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT KONSUMSI LNPR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	9,15	4,40	6,49	4,35	4,43
INDRAGIRI HULU	8,92	4,84	6,01	3,61	3,62
INDRAGIRI HILIR	9,25	6,47	7,47	4,23	4,82
PELALAWAN	8,86	3,24	4,98	3,41	3,37
SIAK	10,04	5,91	4,26	2,72	2,99
KAMPAR	8,64	5,85	6,25	3,36	4,35
ROKAN HULU	9,04	4,57	4,46	4,17	4,39
BENGKALIS	9,74	4,76	6,31	6,29	5,42
ROKAN HILIR	9,32	8,24	3,96	3,97	3,27
KEP. MERANTI	8,84	12,93	4,68	3,90	2,64
PEKANBARU	9,67	7,75	6,23	2,43	5,25
DUMAI	11,39	3,03	3,46	4,93	4,96
JUMLAH	9,39	6,32	5,67	3,66	4,45
PROVINSI RIAU	9,18	4,67	6,36	4,35	4,80

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT KONSUMSI PEMERINTAH (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	0,54	2,09	11,53	13,69	5,47
INDRAGIRI HULU	(0,20)	(0,89)	7,66	12,26	3,73
INDRAGIRI HILIR	(0,69)	(1,04)	8,51	13,65	2,21
PELALAWAN	(0,77)	0,22	8,82	12,66	3,25
SIAK	0,21	0,27	9,04	16,11	4,43
KAMPAR	(0,51)	(0,55)	8,87	13,93	4,47
ROKAN HULU	(1,38)	2,56	8,72	14,79	2,42
BENGKALIS	(0,04)	(0,53)	9,82	12,15	3,50
ROKAN HILIR	1,95	(3,54)	7,90	14,94	2,78
KEP. MERANTI	(0,33)	(0,73)	8,17	12,93	3,88
PEKANBARU	(0,43)	0,50	11,82	15,17	2,70
DUMAI	(0,94)	0,34	8,56	14,90	2,56
JUMLAH	(0,26)	(0,02)	9,90	14,28	3,25
PROVINSI RIAU	(1,17)	(0,29)	10,24	14,88	2,45

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT PMTB (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	4,43	13,36	11,66	7,98	5,13
INDRAGIRI HULU	3,22	10,39	9,62	6,90	3,75
INDRAGIRI HILIR	7,93	8,38	12,23	8,31	4,85
PELALAWAN	5,34	12,47	9,57	8,54	5,02
SIAK	5,29	12,42	10,59	9,77	4,07
KAMPAR	4,92	12,31	11,64	7,22	4,17
ROKAN HULU	6,13	13,30	12,21	8,52	4,11
BENGKALIS	8,92	10,72	11,67	7,45	5,09
ROKAN HILIR	3,87	9,76	9,57	7,54	4,73
KEP. MERANTI	4,36	11,19	8,34	6,81	5,20
PEKANBARU	4,40	14,58	11,70	9,39	3,69
DUMAI	2,98	9,85	9,01	8,08	5,37
JUMLAH	5,02	12,48	11,18	8,50	4,29
PROVINSI RIAU	4,73	15,01	9,92	7,93	3,83

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT PERUBAHAN INVENTORI (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	37,10	40,61	(3,14)	40,29	11,60
INDRAGIRI HULU	32,73	45,35	(14,94)	37,06	(24,10)
INDRAGIRI HILIR	54,31	15,69	(21,35)	30,11	(42,64)
PELALAWAN	40,56	10,15	(20,58)	24,81	(16,33)
SIAK	52,83	18,25	(19,98)	48,16	(60,23)
KAMPAR	84,30	10,32	(21,09)	22,15	(31,89)
ROKAN HULU	67,03	13,25	(25,21)	36,71	(46,21)
BENGKALIS	159,92	14,92	(25,77)	33,70	(66,21)
ROKAN HILIR	95,23	37,71	(25,17)	57,79	(64,47)
KEP. MERANTI	60,14	23,17	(5,73)	35,59	(31,94)
PEKANBARU	25,77	19,79	(29,85)	40,96	(17,39)
DUMAI	27,97	11,87	(5,74)	57,95	(18,76)
JUMLAH	66,50	12,54	(23,51)	38,70	(39,42)
PROVINSI RIAU	67,69	13,63	(25,27)	40,29	(39,40)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT EKSPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	0,27	3,04	2,05	9,63	(0,71)
INDRAGIRI HULU	0,62	4,49	5,62	(1,01)	(1,53)
INDRAGIRI HILIR	(1,82)	6,16	8,63	1,99	(0,98)
PELALAWAN	(0,75)	8,85	2,74	2,82	3,85
SIAK	2,75	6,18	(7,01)	0,73	(0,57)
KAMPAR	4,33	7,15	(7,10)	(3,12)	4,21
ROKAN HULU	(2,00)	10,41	(1,34)	(1,35)	(0,61)
BENGKALIS	9,31	11,14	(15,13)	(2,82)	0,03
ROKAN HILIR	3,55	9,32	2,76	(4,78)	(10,21)
KEP. MERANTI	3,70	11,39	(3,83)	6,36	(1,64)
PEKANBARU	5,18	2,41	5,27	(6,85)	(0,46)
DUMAI	8,39	9,34	0,32	(1,61)	0,99
JUMLAH	3,74	7,01	(4,98)	(1,81)	(0,92)
PROVINSI RIAU	11,12	29,80	(17,64)	2,26	3,21

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT IMPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	4,60	6,42	0,98	11,45	(0,07)
INDRAGIRI HULU	3,98	5,94	5,92	0,23	(0,00)
INDRAGIRI HILIR	3,63	3,64	8,57	(0,00)	0,03
PELALAWAN	2,63	9,35	0,43	2,76	5,21
SIAK	3,23	9,17	1,33	3,85	(0,15)
KAMPAR	4,10	6,43	2,93	(1,29)	8,59
ROKAN HULU	3,51	8,36	(0,62)	0,09	0,04
BENGKALIS	5,37	7,23	(1,26)	(1,11)	(0,61)
ROKAN HILIR	3,41	6,81	21,40	(6,46)	(20,88)
KEP. MERANTI	5,54	8,89	(1,12)	12,18	(0,13)
PEKANBARU	7,90	4,60	4,86	(0,11)	0,13
DUMAI	5,57	9,41	(0,51)	(0,45)	(0,28)
JUMLAH	4,82	6,75	3,42	0,64	(0,24)
PROVINSI RIAU	21,46	60,99	(25,52)	42,25	19,88

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT NET EKSPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	(26,88)	(13,55)	(12,23)	(8,89)	(10,62)
INDRAGIRI HULU	(9,56)	0,60	3,43	(6,14)	(7,38)
INDRAGIRI HILIR	(14,17)	13,22	9,18	6,41	(3,26)
PELALAWAN	(6,57)	8,49	6,96	2,90	1,53
SIAK	4,55	3,85	(16,53)	(3,23)	(1,14)
KAMPAR	2,36	8,66	(30,03)	(12,48)	(16,23)
ROKAN HULU	(45,89)	60,84	(20,35)	(35,14)	(15,70)
BENGKALIS	12,69	13,95	(21,04)	(2,55)	1,68
ROKAN HILIR	4,76	10,32	(10,00)	(3,04)	1,87
KEP. MERANTI	0,22	13,63	(9,11)	(3,02)	(4,39)
PEKANBARU	11,06	9,02	10,96	15,22	4,47
DUMAI	(112,83)	1.541,56	0,44	(31,70)	71,78
JUMLAH	3,19	7,64	(19,37)	(8,19)	(3,23)
PROVINSI RIAU	2,09	8,36	(19,10)	(8,43)	(4,07)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INDRAGIRI HULU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INDRAGIRI HILIR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PELALAWAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SIAK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KAMPAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ROKAN HULU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BENGKALIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ROKAN HILIR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KEP. MERANTI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DUMAI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVINSI RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	39,10	40,29	43,30	43,00	43,48
INDRAGIRI HULU	35,78	35,69	38,89	38,96	39,67
INDRAGIRI HILIR	42,73	42,18	43,63	42,36	43,06
PELALAWAN	28,16	28,12	29,17	29,27	29,47
SIAK	14,23	16,10	20,01	21,11	22,48
KAMPAR	34,54	35,72	42,47	44,18	46,43
ROKAN HULU	61,22	60,28	64,23	64,89	66,12
BENGKALIS	9,95	11,00	15,08	17,29	18,94
ROKAN HILIR	22,36	22,42	26,53	28,29	29,36
KEP. MERANTI	32,71	31,90	35,02	36,45	37,85
PEKANBARU	57,48	55,46	55,04	54,73	54,65
DUMAI	35,26	35,67	36,65	35,84	35,28
JUMLAH	27,80	28,89	33,64	35,00	36,35
PROVINSI RIAU	28,23	29,02	34,04	35,36	36,70

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN KONSUMSI LNPRT (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	0,43	0,46	0,47	0,46	0,47
INDRAGIRI HULU	0,45	0,48	0,50	0,49	0,50
INDRAGIRI HILIR	0,54	0,57	0,56	0,53	0,54
PELALAWAN	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34
SIAK	0,18	0,21	0,24	0,24	0,25
KAMPAR	0,41	0,45	0,50	0,50	0,53
ROKAN HULU	0,76	0,77	0,78	0,77	0,78
BENGKALIS	0,11	0,13	0,17	0,19	0,21
ROKAN HILIR	0,30	0,32	0,36	0,36	0,39
KEP. MERANTI	0,63	0,71	0,75	0,75	0,76
PEKANBARU	0,91	0,92	0,89	0,88	0,91
DUMAI	0,44	0,47	0,46	0,45	0,46
JUMLAH	0,37	0,40	0,45	0,45	0,48
PROVINSI RIAU	0,37	0,40	0,45	0,46	0,48

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN KONSUMSI PEMERINTAH (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	4,54	4,05	4,46	4,70	4,63
INDRAGIRI HULU	3,62	3,15	3,43	3,71	3,78
INDRAGIRI HILIR	3,34	2,80	2,88	3,02	2,98
PELALAWAN	2,86	2,48	2,58	2,77	2,73
SIAK	1,81	1,70	2,13	2,49	2,63
KAMPAR	2,98	2,66	3,17	3,51	3,68
ROKAN HULU	4,69	4,09	4,33	4,70	4,66
BENGKALIS	1,44	1,31	1,88	2,28	2,41
ROKAN HILIR	2,00	1,65	1,91	2,16	2,24
KEP. MERANTI	3,25	2,79	3,08	3,32	3,37
PEKANBARU	11,19	9,00	9,04	9,26	8,93
DUMAI	7,23	6,39	6,54	6,91	6,68
JUMLAH	3,46	3,05	3,58	3,94	4,01
PROVINSI RIAU	3,49	3,03	3,59	4,00	4,08

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN PMTB (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	39,34	40,82	45,09	46,18	46,35
INDRAGIRI HULU	32,89	33,03	36,55	37,56	38,57
INDRAGIRI HILIR	22,84	21,31	22,73	23,15	23,82
PELALAWAN	15,35	15,47	16,43	17,38	18,00
SIAK	13,13	14,77	18,79	20,86	22,52
KAMPAR	25,49	26,06	31,08	32,91	34,54
ROKAN HULU	21,05	20,75	22,65	23,70	24,30
BENGKALIS	8,78	9,69	13,68	15,66	16,95
ROKAN HILIR	6,91	6,77	8,27	9,10	9,80
KEP. MERANTI	21,83	19,14	21,38	22,20	23,18
PEKANBARU	87,67	84,27	88,34	91,88	91,20
DUMAI	51,00	47,51	48,69	48,77	48,65
JUMLAH	24,52	25,22	30,31	32,63	34,04
PROVINSI RIAU	24,35	25,50	30,34	32,46	33,80

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN PERUBAHAN INVENTORI (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	5,98	4,80	(0,07)	(0,10)	(0,10)
INDRAGIRI HULU	5,99	5,69	1,60	1,86	1,00
INDRAGIRI HILIR	6,08	4,57	(0,55)	(0,08)	(0,03)
PELALAWAN	7,13	5,31	1,53	1,95	1,44
SIAK	5,97	4,98	1,17	2,11	0,58
KAMPAR	5,19	3,46	1,44	1,87	1,03
ROKAN HULU	6,49	4,76	1,30	1,87	0,67
BENGKALIS	5,31	3,05	0,26	0,35	0,09
ROKAN HILIR	5,70	4,02	2,86	3,86	1,08
KEP. MERANTI	6,92	5,95	0,32	0,46	0,24
PEKANBARU	6,06	5,75	1,38	2,14	0,80
DUMAI	5,88	5,66	3,27	4,92	3,20
JUMLAH	5,81	4,38	1,15	1,71	0,72
PROVINSI RIAU	5,83	4,44	1,13	1,74	0,72

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN EKSPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	107,51	103,91	100,68	100,17	99,97
INDRAGIRI HULU	92,57	92,09	88,36	87,75	87,24
INDRAGIRI HILIR	90,92	97,36	99,97	99,92	98,76
PELALAWAN	134,62	135,44	133,65	129,95	132,39
SIAK	130,55	131,78	133,13	131,66	130,43
KAMPAR	104,67	103,57	121,83	114,91	103,47
ROKAN HULU	102,25	103,33	101,25	100,55	100,91
BENGKALIS	106,56	107,44	107,34	106,86	106,67
ROKAN HILIR	107,64	107,67	106,11	102,37	102,96
KEP. MERANTI	103,99	104,07	102,92	101,65	100,66
PEKANBARU	68,01	65,74	93,04	91,75	93,61
DUMAI	107,85	112,59	126,81	128,10	130,28
JUMLAH	105,43	105,41	110,00	108,00	106,94
PROVINSI RIAU	55,09	54,49	38,47	33,82	37,89

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN IMPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	96,90	94,33	93,93	94,42	94,80
INDRAGIRI HULU	71,28	70,13	69,35	70,33	70,77
INDRAGIRI HILIR	66,44	68,79	69,22	68,90	69,11
PELALAWAN	88,48	87,18	83,72	81,66	84,38
SIAK	65,87	69,55	75,47	78,46	78,89
KAMPAR	73,28	71,92	100,49	97,89	89,69
ROKAN HULU	96,45	93,99	94,55	96,48	97,44
BENGKALIS	32,16	32,62	38,42	42,63	45,27
ROKAN HILIR	44,91	42,86	46,03	46,14	45,82
KEP. MERANTI	69,33	64,56	63,46	64,82	66,05
PEKANBARU	131,32	121,15	147,73	150,63	150,10
DUMAI	107,66	108,28	122,42	125,00	124,54
JUMLAH	67,38	67,35	79,12	81,74	82,54
PROVINSI RIAU	17,37	16,87	8,02	7,83	13,67

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KOMPONEN NET EKSPOR (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	10,60	9,58	6,75	5,75	5,18
INDRAGIRI HULU	21,29	21,96	19,02	17,42	16,47
INDRAGIRI HILIR	24,48	28,57	30,75	31,02	29,64
PELALAWAN	46,14	48,26	49,94	48,28	48,01
SIAK	64,68	62,24	57,66	53,19	51,54
KAMPAR	31,39	31,65	21,34	17,03	13,78
ROKAN HULU	5,80	9,34	6,70	4,07	3,47
BENGKALIS	74,40	74,82	68,92	64,23	61,40
ROKAN HILIR	62,74	64,81	60,07	56,23	57,14
KEP. MERANTI	34,66	39,51	39,46	36,83	34,60
PEKANBARU	(63,31)	(55,41)	(54,69)	(58,88)	(56,49)
DUMAI	0,19	4,30	4,39	3,11	5,74
JUMLAH	38,05	38,06	30,89	26,27	24,40
PROVINSI RIAU	37,73	37,62	30,45	25,98	24,22

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	3,55	3,56	3,87	4,03	4,15
INDRAGIRI HULU	4,93	5,01	5,32	5,42	5,45
INDRAGIRI HILIR	6,84	7,10	7,96	8,40	8,59
PELALAWAN	5,12	5,25	5,87	6,03	6,17
SIAK	13,56	12,72	11,87	11,56	11,19
KAMPAR	10,16	10,21	10,19	10,20	10,06
ROKAN HULU	3,57	3,76	4,14	4,27	4,36
BENGKALIS	25,86	24,62	20,83	19,37	18,70
ROKAN HILIR	10,76	11,06	10,86	10,74	10,48
KEP. MERANTI	2,16	2,24	2,33	2,35	2,35
PEKANBARU	9,99	10,96	12,86	13,53	14,25
DUMAI	3,51	3,51	3,91	4,10	4,26
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KONSUMSI RUMAH TANGGA KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	4,99	4,97	4,98	4,95	4,96
INDRAGIRI HULU	6,35	6,19	6,15	6,04	5,94
INDRAGIRI HILIR	10,51	10,36	10,33	10,17	10,17
PELALAWAN	5,19	5,11	5,09	5,04	5,00
SIAK	6,94	7,09	7,06	6,97	6,92
KAMPAR	12,62	12,62	12,86	12,88	12,86
ROKAN HULU	7,87	7,85	7,90	7,91	7,94
BENGKALIS	9,25	9,37	9,34	9,57	9,74
ROKAN HILIR	8,66	8,59	8,57	8,68	8,46
KEP. MERANTI	2,54	2,48	2,42	2,45	2,45
PEKANBARU	20,65	21,03	21,04	21,15	21,42
DUMAI	4,45	4,33	4,26	4,19	4,13
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KONSUMSI LNPRT KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	4,18	4,08	4,11	4,12	4,08
INDRAGIRI HULU	5,99	5,96	6,00	5,91	5,71
INDRAGIRI HILIR	10,05	10,05	10,04	9,75	9,70
PELALAWAN	5,04	4,70	4,64	4,58	4,44
SIAK	6,55	6,52	6,38	6,19	5,95
KAMPAR	11,40	11,40	11,44	11,29	11,20
ROKAN HULU	7,40	7,23	7,23	7,23	7,17
BENGKALIS	8,08	8,03	8,01	8,26	8,29
ROKAN HILIR	8,65	8,87	8,72	8,58	8,53
KEP. MERANTI	3,73	3,95	3,90	3,87	3,72
PEKANBARU	24,73	25,14	25,53	26,15	27,14
DUMAI	4,21	4,06	4,01	4,08	4,08
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI KONSUMSI PEMERINTAH KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	4,66	4,73	4,82	4,80	4,78
INDRAGIRI HULU	5,16	5,18	5,09	5,10	5,14
INDRAGIRI HILIR	6,60	6,52	6,41	6,43	6,37
PELALAWAN	4,23	4,27	4,23	4,23	4,20
SIAK	7,10	7,08	7,05	7,29	7,34
KAMPAR	8,75	8,91	9,03	9,09	9,24
ROKAN HULU	4,85	5,04	5,00	5,08	5,06
BENGKALIS	10,76	10,58	10,93	11,19	11,24
ROKAN HILIR	6,21	5,98	5,81	5,88	5,86
KEP. MERANTI	2,04	2,06	2,00	1,98	1,98
PEKANBARU	32,32	32,32	32,47	31,74	31,70
DUMAI	7,33	7,34	7,15	7,18	7,09
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI PMTB KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	5,69	5,77	5,76	5,70	5,65
INDRAGIRI HULU	6,62	6,56	6,41	6,24	6,17
INDRAGIRI HILIR	6,37	6,00	5,97	5,96	6,01
PELALAWAN	3,21	3,22	3,18	3,21	3,26
SIAK	7,26	7,45	7,36	7,39	7,40
KAMPAR	10,56	10,55	10,45	10,29	10,21
ROKAN HULU	3,07	3,10	3,09	3,10	3,11
BENGKALIS	9,26	9,46	9,40	9,30	9,31
ROKAN HILIR	3,04	2,97	2,96	2,99	3,02
KEP. MERANTI	1,93	1,70	1,64	1,60	1,60
PEKANBARU	35,71	36,61	37,48	38,09	38,17
DUMAI	7,29	6,61	6,29	6,12	6,09
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI PERUBAHAN INVENTORI KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	3,65	3,90	(0,23)	(0,24)	(0,60)
INDRAGIRI HULU	5,09	6,50	7,44	5,91	7,56
INDRAGIRI HILIR	7,17	7,40	(3,84)	(0,41)	(0,41)
PELALAWAN	6,29	6,37	7,84	6,90	12,35
SIAK	13,95	14,46	12,09	14,31	8,97
KAMPAR	9,09	8,06	12,78	11,20	14,41
ROKAN HULU	4,00	4,09	4,71	4,67	4,10
BENGKALIS	23,66	17,11	4,80	3,97	2,34
ROKAN HILIR	10,57	10,15	27,10	24,32	15,70
KEP. MERANTI	2,58	3,04	0,64	0,63	0,80
PEKANBARU	10,42	14,38	15,51	16,94	15,86
DUMAI	3,55	4,53	11,16	11,81	18,94
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI EKSPOR KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	3,62	3,51	3,54	3,74	3,88
INDRAGIRI HULU	4,33	4,38	4,27	4,41	4,44
INDRAGIRI HILIR	5,90	6,55	7,24	7,77	7,93
PELALAWAN	6,54	6,75	7,13	7,25	7,63
SIAK	16,79	15,90	14,37	14,09	13,65
KAMPAR	10,08	10,03	11,28	10,86	9,74
ROKAN HULU	3,47	3,69	3,81	3,97	4,12
BENGKALIS	26,13	25,09	20,32	19,17	18,65
ROKAN HILIR	10,99	11,30	10,48	10,18	10,09
KEP. MERANTI	2,13	2,22	2,18	2,21	2,21
PEKANBARU	6,44	6,83	10,88	11,49	12,47
DUMAI	3,59	3,74	4,51	4,86	5,19
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI IMPOR KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	5,10	4,99	4,60	4,66	4,77
INDRAGIRI HULU	5,22	5,22	4,66	4,67	4,67
INDRAGIRI HILIR	6,75	7,25	6,97	7,08	7,19
PELALAWAN	6,72	6,80	6,21	6,02	6,30
SIAK	13,25	13,14	11,32	11,10	10,70
KAMPAR	11,04	10,90	12,94	12,22	10,94
ROKAN HULU	5,11	5,25	4,94	5,03	5,15
BENGKALIS	12,34	11,92	10,11	10,11	10,26
ROKAN HILIR	7,17	7,04	6,32	6,06	5,82
KEP. MERANTI	2,23	2,15	1,87	1,86	1,88
PEKANBARU	19,46	19,71	24,01	24,93	25,91
DUMAI	5,60	5,64	6,05	6,26	6,43
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB KABUPATEN/KOTA MENURUT PENGELUARAN
DISTRIBUSI NET EKSPOR KABUPATEN KOTA (PERSEN)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KUANTAN SINGINGI	0,99	0,90	0,85	0,88	0,88
INDRAGIRI HULU	2,76	2,89	3,27	3,60	3,68
INDRAGIRI HILIR	4,40	5,33	7,93	9,93	10,43
PELALAWAN	6,21	6,66	9,49	11,08	12,13
SIAK	23,05	20,80	22,16	23,41	23,63
KAMPAR	8,38	8,49	7,04	6,61	5,68
ROKAN HULU	0,54	0,92	0,90	0,66	0,62
BENGKALIS	50,56	48,39	46,47	47,38	47,05
ROKAN HILIR	17,75	18,84	21,13	23,00	24,54
KEP. MERANTI	1,97	2,33	2,98	3,29	3,33
PEKANBARU	(16,62)	(15,95)	(22,77)	(30,32)	(32,98)
DUMAI	0,02	0,40	0,56	0,48	1,00
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru 28131
Telp. (0761) 23042, fax. (0761) 21336
homepage: <http://riau.bps.go.id> email: bps1400@bps.go.id